



PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 546), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Tugas dan Fungsi BPKP

Pelaksanaan pembangunan nasional serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi membutuhkan fungsi pengawasan intern yang andal dan sistem pengendalian intern yang memadai. Fungsi ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor intern pemerintah dan auditor Presiden yang sekaligus berperan untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional dari pelaksanaan program-program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). BPKP juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014). Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKP melaksanakan beberapa fungsi, antara lain perumusan kebijakan nasional pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya) terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional maupun kegiatan lainnya yang menggunakan keuangan negara. Selain itu, BPKP juga menjalankan fungsi pemberian konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.

Keterlibatan BPKP dalam mekanisme pengendalian RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan suatu bentuk pengakuan yang strategis dan selaras dengan mandat kelembagaan BPKP. Sesuai Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008), BPKP diberi mandat untuk melaksanakan pengawasan intern kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Peran ini

diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023) yang menyebutkan peran BPKP sebagai pembina penyelenggaraan MRPN organisasi dan MRPN lintas sektor, serta selaku pembina terhadap pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN organisasi dan MRPN lintas sektor pada kementerian/lembaga dan badan Lainnya. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, BPKP berperan untuk mengawal program pembangunan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan memberantas korupsi. Secara khusus, sesuai perhatian dan arahan Presiden di beberapa kesempatan formal, fokus pengawasan BPKP dalam 5 (lima) tahun mendatang pada area sebagai berikut:

1. penguatan pertahanan;
2. dukungan penegakan hukum;
3. efektivitas dan efisiensi anggaran pembangunan;
4. pengawalan anggaran pendidikan;
5. perwujudan kesejahteraan umum dan percepatan pengentasan kemiskinan;
6. swasembada pangan, energi dan hilirisasi industri;
7. makan bergizi gratis; dan
8. reformasi kesehatan.

1.1.2 Capaian Rencana Strategis BPKP 2020 - 2024

1.1.2.1 Kontribusi Keuangan Negara

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024, BPKP berhasil memberikan kontribusi pada keuangan negara sebesar Rp379,30 triliun (207% dari target sebesar Rp182,90 triliun). Capaian “Kontribusi Keuangan Negara” terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1) Nilai potensi penerimaan negara/daerah

Nilai potensi penerimaan negara/daerah diperoleh dari pengawasan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber penerimaan lainnya. Hasil pengawasan BPKP atas optimalisasi penerimaan negara dan daerah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tercatat potensi penambahan ruang fiskal sebesar Rp44,75 triliun.

Tingginya capaian kinerja disebabkan oleh sinergi yang dilakukan secara masif antara BPKP dengan mitra kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) terkait. Kolaborasi yang dilakukan oleh BPKP antara lain dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kegiatan pemeriksaan PNBP sektor pertambangan dan dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Selain itu, BPKP juga memberikan konsultansi berupa bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan kegiatan pemeriksaan lainnya. Hal ini menandakan tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD sesuai dengan potensi khas daerah masing-masing.

- 2) Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien
Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien merupakan nilai rupiah yang dapat dihemat dan/atau dicegah keluar dari kas negara/daerah berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Efisiensi belanja dimulai dari perencanaan yang kemudian menyasar belanja yang tidak berdampak langsung bagi pembangunan. Pengawasan terhadap pengeluaran negara periode tahun 2020 sampai dengan 2024 telah menghasilkan penghematan atas pengeluaran negara sebesar Rp244,35 triliun. Penghematan tersebut diperoleh antara lain dari audit klaim, audit penyesuaian harga, reviu tunggakan/tagihan, penyetoran ke kas negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas), *cost recovery*, dan evaluasi perencanaan dan penganggaran.
- 3) Nilai penyelamatan keuangan negara
Nilai penyelamatan keuangan negara merupakan nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara. Hasil pengawasan BPKP atas penyelamatan keuangan negara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp90,20 triliun. Penyelamatan keuangan negara tersebut diperoleh antara lain dari kegiatan audit investigatif, yaitu audit investigatif non aparat penegak hukum (APH), audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), dan audit penyelamatan keuangan negara non investigatif.

1.1.2.2 Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Selama periode 2020-2024, BPKP telah melaksanakan pengawasan akuntabilitas pembangunan nasional yang menjadi fokus dan perhatian Presiden, antara lain:

1) Pendidikan

Hasil pengawasan BPKP terhadap aksesibilitas pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera ditangani, seperti angka partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah, terutama pada jenjang menengah ke atas. Tantangan selanjutnya terkait tingginya angka putus sekolah yang didorong oleh faktor ekonomi serta belum didukung oleh konvergensi bantuan sosial yang memadai. Tantangan berikutnya yaitu ketidakmerataan kualitas pendidikan, mulai dari ketidakmerataan kualitas tenaga pengajar maupun sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan di wilayah Indonesia. Tantangan lainnya yaitu terkait masih rendahnya ke bekerjaan lulusan vokasi dan perguruan tinggi di Indonesia yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kurikulum yang disusun juga belum relevan dengan kebutuhan industri, informasi pasar kerja masih minim, dan minat lulusan untuk berwirausaha masih rendah.

BPKP telah memberikan beberapa rekomendasi, yaitu perlunya perbaikan tata kelola untuk penguatan kurikulum, peningkatan kualitas pengajar, penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi -lulusan vokasi, serta penguatan dan integrasi sistem informasi pasar kerja. Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2) Kesehatan

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam cakupan perlindungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan angka harapan hidup, namun berbagai tantangan masih perlu diatasi. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi buruk, *stunting*, dan penyakit katastropik seperti kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini, serta diperparah dengan layanan promotif dan preventif yang kurang optimal. Upaya peningkatan kualitas kesehatan juga terhambat akibat dari ketidakcukupan kebijakan penanganan penyakit, kondisi fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta laboratorium kesehatan yang belum memenuhi standar skrining. Hal ini diperburuk dengan adanya permasalahan ketersediaan obat yang belum merata, kondisi obat rusak dan keamanan kandungan obat yang akan digunakan.

Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, BPKP telah merekomendasikan perlunya penguatan sistem kesehatan yang komprehensif. Pembinaan menyeluruh diperlukan mulai dari aspek layanan kesehatan (promotif, preventif, dan kuratif), sarana prasarana, tenaga kesehatan, jaminan kesehatan hingga tata kelola obat. Selain itu, perlu komitmen berupa dukungan dan pembiayaan yang cukup dari pemerintah pusat maupun daerah.

3) Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur Indonesia pada 2020-2024 telah mengalami kemajuan signifikan dengan anggaran sebesar Rp1.200,84 triliun. Pembangunan infrastruktur konektivitas ini diharapkan mampu mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun hasil pengawasan BPKP menunjukkan bahwa pemanfaatan pembangunan ini belum optimal karena ketidakselarasan penyelesaian infrastruktur utama dan penunjang, permasalahan pembebasan lahan, dan kurangnya integrasi perencanaan antar sektor.

Selain masalah pemanfaatan, pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan antara lain terbatasnya pendanaan non-APBN, lemahnya tata kelola skema KPBU, serta perubahan spesifikasi teknis

yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Tantangan lainnya yaitu terkait ketidakseimbangan pembagian risiko serta membengkaknya biaya pembangunan karena lambatnya penyelesaian proyek yang menyulitkan upaya menarik investasi swasta untuk pembangunan infrastruktur.

BPKP memberikan rekomendasi berupa langkah perbaikan yang diperlukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan perencanaan strategis yang terintegrasi agar pemanfaatan infrastruktur lebih efektif. Sinkronisasi penyelesaian infrastruktur utama dan penunjang serta perbaikan tata kelola KPBU dan penyediaan lahan yang efisien dapat meningkatkan minat investasi swasta dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

4) Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Pembenahan fiskal mensyaratkan adanya penerimaan yang optimal dan belanja yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, pengawasan BPKP telah menghasilkan peta permasalahan persisten pengelolaan penerimaan dan belanja negara, yaitu:

a) Klaster Penerimaan Negara

- (1) target pendapatan ditetapkan di bawah potensi;
- (2) kelemahan dalam pengelolaan *tax expenditure*;
- (3) kelemahan dalam administrasi perpajakan; dan
- (4) kelemahan pengendalian kecurangan dalam pengelolaan penerimaan negara.

b) Klaster Belanja Negara

- (1) kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran;
- (2) keterlambatan dalam eksekusi anggaran dengan lonjakan di akhir tahun;
- (3) lemahnya efektivitas belanja pemerintah;
- (4) kelemahan daya ungkit belanja daerah; dan
- (5) kelemahan pengelolaan dana desa.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas fiskal, BPKP telah menyampaikan rekomendasi mulai dari perbaikan kebijakan dan tata kelola yang mencakup tahapan perencanaan, harmonisasi kebijakan, serta pengawasan. Pembenahan fiskal yang optimal akan menghasilkan peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang efektif.

5) Transformasi Ekonomi

Selama 5 (lima) tahun terakhir, pemerintah telah berupaya mendorong hilirisasi melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk pengembangan kawasan industri, pembangunan smelter, dan peningkatan kemudahan berusaha. Namun, hasil pengawasan BPKP menunjukkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan belum mencapai target yang diharapkan. Meski ada beberapa kemajuan, seperti peningkatan investasi di sektor hilirisasi, sejumlah tantangan masih

membatasi capaian pembangunan industri, di antaranya lambatnya pembangunan kawasan industri, kurangnya sinkronisasi dalam tata kelola bahan baku, serta ketidaksesuaian antara suplai tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Pemerintah perlu memperkuat perencanaan pembangunan industri yang lebih terintegrasi, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung produktivitas dan daya saing industri nasional. Selain itu, peningkatan investasi harus menjadi prioritas untuk mempercepat pembangunan industri, terutama melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, penyederhanaan proses perizinan, serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki desain hilirisasi guna mempercepat pembangunan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

6) Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, kemampuan pemenuhan pangan Indonesia secara mandiri masih menghadapi kondisi mengkhawatirkan. Penurunan produksi dalam negeri mengakibatkan pemenuhan kebutuhan tujuh komoditas pangan bergantung pada impor. Bauran intervensi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan (*on farm*) seringkali tidak efektif karena tidak mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Di sisi *off farm*, lemahnya penanganan pasca panen, panjangnya *supply chain*, serta lemahnya penerapan instrumen harga turut mempengaruhi fluktuasi harga dan kelangkaan stok komoditas pangan.

Untuk mengakselerasi keberhasilan di sektor pangan, BPKP telah memberikan rekomendasi, yaitu membangun *grand design* sektor ketahanan pangan yang holistik dan data pangan terintegrasi agar intervensi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha (K/L/D/BU) dapat berjalan selaras dan optimal. Rekomendasi berikutnya yaitu terkait kondisi kesejahteraan petani yang belum optimal, sehingga penajaman intervensi perlu difokuskan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya produksi petani. Selain itu, pemerintah perlu memberi perhatian khusus atas perubahan struktur pasar gabah agar krisis beras seperti yang terjadi di akhir tahun 2023 tidak berulang.

7) Pembangunan Energi Berkelanjutan

Energi memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Hasil penilaian ketahanan energi Indonesia tahun 2023 oleh Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan posisi “tahan” dengan nilai 6,64 (dari skala 10), namun pengelolaan energi nasional masih menghadapi beberapa permasalahan. Indonesia masih bergantung pada impor minyak bumi, bahan bakar minyak, dan *liquified*

petroleum gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Selain itu, disparitas harga komoditas energi berdampak pada kenaikan subsidi yang terus membebani fiskal pemerintah. Di sisi lain, ketergantungan pada energi berbasis fosil menyebabkan emisi karbon yang terus meningkat sebesar 5,8% per tahun, bahkan dalam 2 (dua) tahun terakhir sektor energi telah menyumbang 58% total emisi nasional. Oleh karena itu, transisi energi bukan lagi opsi, Pemerintah perlu berkomitmen untuk mempercepat peralihan penggunaan sumber energi berbasis fosil menjadi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta membangun sistem, kebijakan, dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung transisi tersebut. Atas kondisi tersebut, BPKP merekomendasikan perlunya harmonisasi guna memastikan keselarasan, keterpaduan, dan konsistensi substansi dan implementasi seluruh peraturan pengelolaan energi nasional. Langkah berikutnya yaitu melakukan evaluasi kebijakan dan kriteria terkait subsidi dan kompensasi energi, serta mengalihkan program subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis individu/rumah tangga. Setelah itu baru dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan paket kebijakan transisi energi, antara lain konsolidasi target pengembangan EBT, pengembangan industri dalam negeri, elektrifikasi industri dan transportasi, serta pembiayaan/insentif fiskal/investasi.

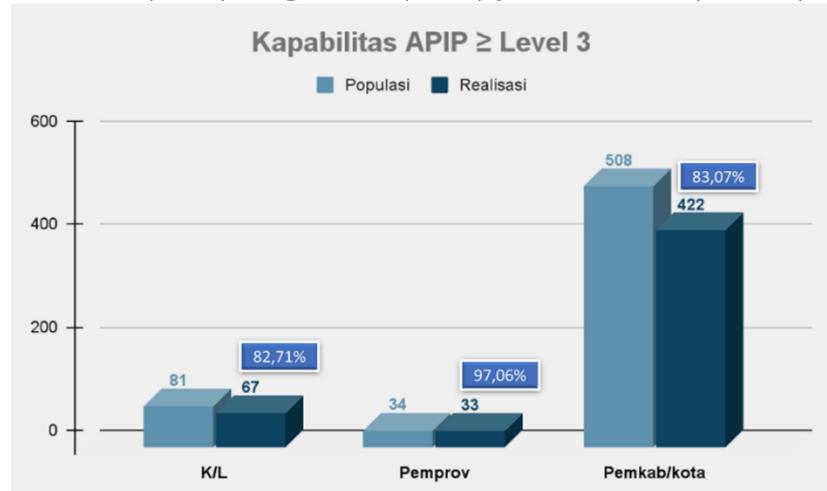
- 8) Optimalisasi Daya Dukung Korporasi Negara/Daerah
Evaluasi BPKP terhadap pelaksanaan tata kelola BUMN/D menunjukkan kinerja keuangan BUMN secara konsolidasi terus meningkat, namun masih terdapat perusahaan yang merugi, bahkan 23 dari 66 BUMN berada dalam kondisi *financially distressed*. Beberapa diantaranya memegang peran strategis dalam sektor kunci pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, transportasi dan konektivitas, hingga asuransi dan dana pensiun. Belajar dari keterlambatan penyelesaian proyek strategis dan *cost overrun* yang timbul, kualitas perencanaan dan penerapan manajemen risiko yang memadai menjadi isu utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan BUMN.
BPKP telah merekomendasikan untuk meningkatkan peran pengawasan oleh Kementerian BUMN dalam penyelenggaraan pembangunan oleh BUMN khususnya dalam memantau efektivitas dukungan pemerintah terhadap BUMN seperti penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN). Selain itu, juga direkomendasikan adanya penguatan tata kelola dan manajemen risiko di lingkungan BUMN/D.

1.1.2.3 Penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

1) Kualitas pengendalian internal pada K/L/D/BU

Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/D/BU” ini diukur dengan IKU sebagai berikut:

- a) Persentase K/L/D dengan kapabilitas APIP \geq level 3
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada K/L/D merupakan kemampuan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPKP mengembangkan model kapabilitas pengawasan intern yang dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021). Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam 5 (lima) tingkatan (level) yaitu: *initial* (level 1),



structured (level 2), *delivered* (level 3), *institutionalized* (level 4), dan *optimized* (level 5). Perbandingan populasi dengan realisasi jumlah K/L/D dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Populasi dan realisasi K/L/D dengan kapabilitas APIP \geq Level 3 sampai dengan tahun 2024
sumber: *hasil pengawasan BPKP, diolah*

Secara umum, realisasi jumlah K/L/D dengan kapabilitas APIP \geq Level 3 sampai dengan tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 83,79% (522 APIP K/L/D) dari target 92,57% (577 APIP K/L/D).

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kapabilitas APIP $>$ Level 3 antara lain:

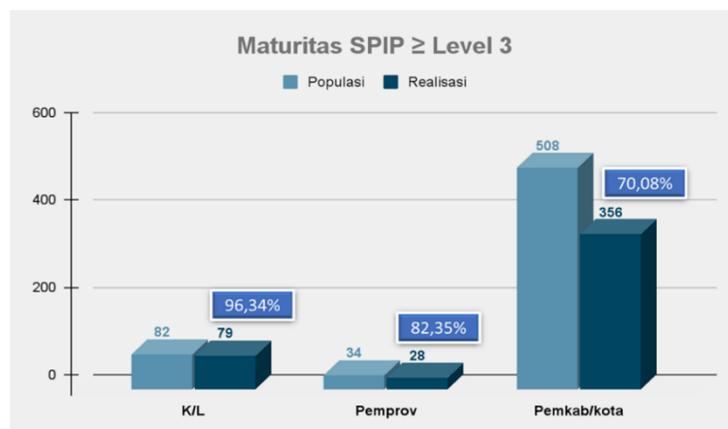
- (1) kurangnya komitmen pimpinan K/L/D terhadap pelibatan APIP dalam pengawasan program-program strategis;

- (2) belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas auditor secara memadai; dan
- (3) minimnya alokasi anggaran pengawasan pada APIP K/L/D.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kapabilitas APIP \geq level 3 antara lain:

- (1) bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) dan Surat Edaran bersama dalam rangka penguatan APIP;
 - (2) memberikan atensi kepada pimpinan K/L/D untuk meningkatkan dukungan dalam peningkatan kapabilitas dan pemberdayaan APIP;
 - (3) melakukan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP K/L/D melalui bimbingan teknis, *workshop*, evaluasi/*quality assurance* (QA) atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP K/L/D serta pemantauan atas *Area of Improvement* (AoI) atas hasil evaluasi; dan
 - (4) menyelenggarakan program peningkatan kompetensi SDM APIP K/L/D melalui program sertifikasi dan pelatihan bagi pimpinan maupun auditor APIP K/L/D.
- b) Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, diharapkan akan semakin baik kualitas tata kelola dalam pencapaian tujuan organisasi. Tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/D berada pada level 3 atau tingkat “Terdefinisi”. Perbandingan populasi dengan realisasi jumlah K/L/D dengan Maturitas SPIP \geq level 3 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Populasi dan realisasi K/L/D dengan maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan tahun 2024



sumber: hasil pengawasan BPKP, diolah

Secara umum, realisasi jumlah K/L/D dengan maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 74,20% (463 K/L/D) dari target 94,13% (587 K/L/D). Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target maturitas SPIP \geq level 3 antara lain:

- (1) strategi perbaikan pengendalian intern dan manajemen risiko di K/L/D belum didukung kerangka penerapan yang memadai;
- (2) pimpinan tinggi K/L/D terkena kasus korupsi;
- (3) kurangnya komitmen penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang perlu dibangun secara kolektif mulai dari level pimpinan tinggi hingga seluruh pegawai K/L/D; dan
- (4) kurangnya dukungan kompetensi sumber daya manusia yang memadai pada K/L/D dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

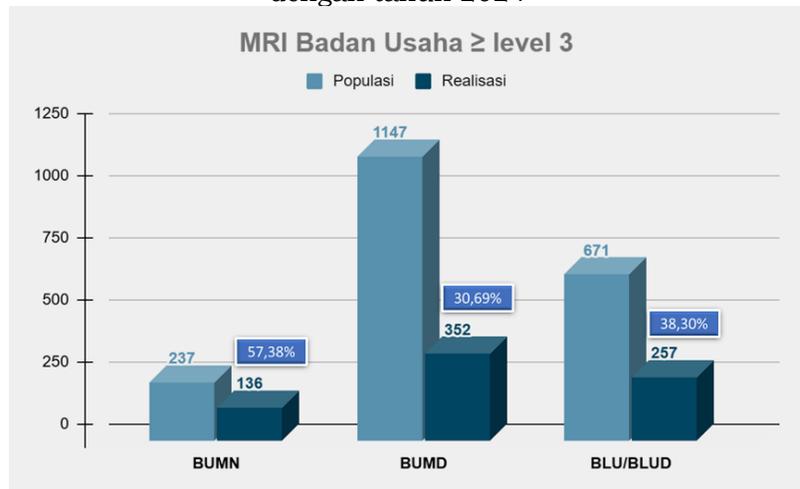
Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target maturitas SPIP \geq Level 3 antara lain:

- (1) menerbitkan kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP K/L/D untuk meningkatkan adaptabilitas dan kebermanfaatan yang konkret atas penyelenggaraan SPIP K/L/D;
- (2) melakukan pembinaan peningkatan maturitas SPIP terintegrasi K/L/D yang meliputi pembinaan generik, kontekstual dan penguatan penilaian maturitas SPIP melalui bimbingan teknis, *workshop*, evaluasi/QA atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi K/L/D, serta pemantauan atas AoI hasil evaluasi; dan
- (3) menyelenggarakan program peningkatan kompetensi SDM K/L/D melalui program sertifikasi dan pelatihan bagi pimpinan maupun pegawai K/L/D terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

- c) Persentase Badan Usaha dengan MRI \geq Level 3
- Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/D/BU. Model tersebut memadukan budaya, tata kelola, dan proses manajemen risiko. Semakin tinggi MRI, diharapkan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan Badan Usaha. Populasi Badan Usaha dalam pengukuran

MRI yaitu sebanyak 2.055 Badan Usaha, yang terdiri atas BUMN dan anak perusahaan, BLU/D, serta BUMD yang terdiri dari jasa air minum, aneka usaha, dan jasa keuangan (Badan Pembangunan Daerah/BPD dan Badan Perkreditan Rakyat/BPR). Perbandingan populasi dengan realisasi jumlah Badan Usaha dengan MRI \geq level 3 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Populasi dan realisasi MRI $>$ level 3 sampai dengan tahun 2024



sumber: hasil pengawasan BPKP, diolah

Secara umum realisasi jumlah Badan Usaha dengan MRI $>$ level 3 sampai dengan tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 36,25% (745 BU) dari target 36,06% (741 BU) dari total 2.055 BU.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target MRI Badan Usaha \geq Level 3 antara lain:

- (1) melakukan bimbingan teknis, *workshop*, evaluasi/QA atas hasil *assessment* penilaian MRI badan usaha serta pemantauan AoI atas hasil evaluasi atau *assessment*; dan
- (2) melakukan *piloting* laboratorium manajemen risiko.

2) Efektivitas pengendalian kecurangan

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan pengukuran atas kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. IEPK pada K/L/D/BU diukur sebagai salah satu unsur dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Skor IEPK merupakan komposit skor atas 3 (tiga) pilar, yaitu: kapabilitas, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.

Perbandingan populasi dengan realisasi jumlah K/L/D/BU dengan IEPK \geq level 3 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.4 Populasi dan realisasi IEPK K/L/D/BU \geq level 3 sampai dengan tahun 2024



sumber: hasil pengawasan BPKP, diolah

Secara umum realisasi jumlah K/L dengan IEPK \geq level 3 sampai dengan tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 54 K/L dari target 12 K/L, sementara realisasi Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha dengan IEPK \geq level 3 sampai dengan tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi Pemda IEPK \geq level 3 sebanyak 77 Pemda (49,04%) dari target 157 Pemda, serta realisasi badan usaha dengan IEPK level 3 yaitu 41 (55,41%) badan usaha dari target 74 badan usaha. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IEPK \geq level 3 antara lain:

- kurangnya kepedulian dari mitra untuk melakukan pencegahan korupsi dan belum memahami manfaat dan substansi pemenuhan IEPK;
- belum adanya kewajiban Pemda untuk melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi (termasuk IEPK) tiap tahun, sehingga Pemda hanya melakukan penilaian apabila ada target kenaikan level/skor; dan
- kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada badan usaha.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target IEPK K/L/D/BU \geq Level 3 antara lain:

- melakukan sosialisasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi dan kegiatan peningkatan IEPK kepada auditor di unit kerja; dan
- melakukan pendampingan kepada K/L/D dalam melakukan identifikasi risiko kecurangan dan membahas hasil penilaian risiko kecurangan.

1.1.2.4. Tata kelola pengawasan yang berkualitas

Pelaksanaan peran dan kontribusi BPKP dalam pembangunan nasional dibangun dari pondasi tata kelola pengawasan yang berkualitas yang dinilai dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPKP. Capaian hasil penilaian Indeks RB BPKP dalam periode tahun 2020 sampai 2024 diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian penilaian Indeks RB BPKP, 2020-2024

No.	Tahun	Skor RB	Kategori
1.	2020	85,03	A
2.	2021	85,75	A
3.	2022	86,19	A
4.	2023	87,22	A-
5.	2024	92,66	A-

Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2020-2024

Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang berimplikasi pada perubahan penilaian termasuk kategori Indeks Reformasi Birokrasi. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan kategori capaian yang diraih oleh BPKP.

Perubahan pola pikir yang dilakukan melalui reformasi birokrasi (RB) telah menjadi pondasi utama atas pengawasan yang dilakukan BPKP. Skor RB BPKP merupakan hasil dari pembangunan RB di BPKP, yang bermakna bahwa seluruh unit kerja dan pegawai BPKP telah memahami pentingnya pola pikir "hadir bermanfaat". Seluruh pengawasan yang dilakukan BPKP harus bermanfaat dan berdampak bagi *stakeholder*. Berbagai unsur dan instrumen yang dibangun pada pelaksanaan RB, dilakukan di level tata kelola institusi dengan tujuan untuk memastikan bahwa institusi telah sehat dan mampu memberikan dampak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, unsur dan instrumen RB juga memiliki peran sebagai pendukung (*supporting*) dan pendorong (*enabling*) atas seluruh pengawasan yang dilakukan BPKP.

Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan BPKP secara *sustainable* dalam rangka mencapai Indeks RB di atas antara lain:

- a) menyusun dan melaksanakan rencana aksi pada setiap indikator penilaian RB General dan Tematik sebagai fokus implementasi pembangunan RB yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan; dan

- b) melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagai miniatur RB pada seluruh unit kerja BPKP baik pada unit pusat maupun perwakilan, sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB BPKP secara menyeluruh.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan dilakukan untuk memahami posisi dan mengembangkan strategi organisasi BPKP sebagai perwujudan peran fungsi auditor intern pemerintah/auditor Presiden dalam perspektif *system-thinking* tata kelola pemerintahan Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan SWOT: kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

1) Aspek kelembagaan

a) Kewenangan BPKP

Berdasarkan aspek formal, BPKP memiliki posisi yang strategis dan kuat karena berada langsung di bawah pimpinan tertinggi organisasi pemerintahan (Presiden). Berdasarkan aspek substantif, pelaksanaan kewenangan BPKP tidak mengalami pembatasan ruang lingkup karena terkait akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan Presiden, sekaligus sebagai instansi pembina SPIP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, di mana Kepala BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ruang lingkup pengawasan yang semakin luas ini dikuatkan dengan diterbitkannya beberapa Instruksi Presiden yang menyebutkan peran BPKP secara langsung untuk melakukan pengawasan mulai dari implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional hingga optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Cakupan pengawasan juga semakin besar karena objek pengawasan yang sangat beragam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengawasan akuntabilitas penerimaan negara/daerah, akuntabilitas belanja negara/daerah, pembangunan nasional/daerah, akuntabilitas pembiayaan negara/daerah serta badan usaha yang didalamnya ada kepentingan negara.

b) Kantor Perwakilan di 36 Provinsi

BPKP mempunyai kantor perwakilan di 36 provinsi sebagai instansi vertikal dengan level Eselon II. Perwakilan BPKP Provinsi dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. BPKP mempunyai kapabilitas jangkauan ke semua daerah, baik lingkup provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, pengawasan telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

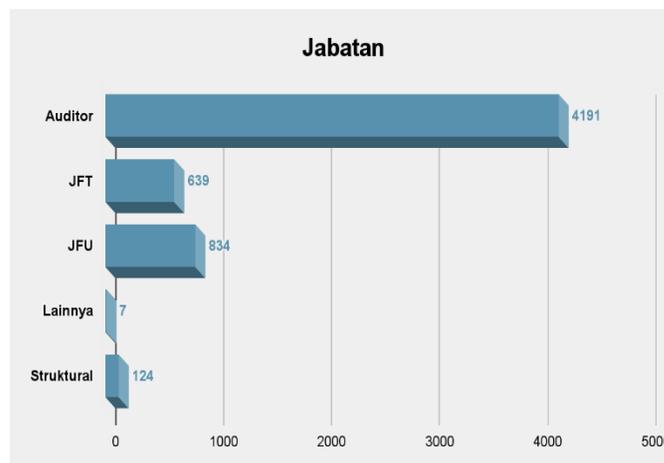
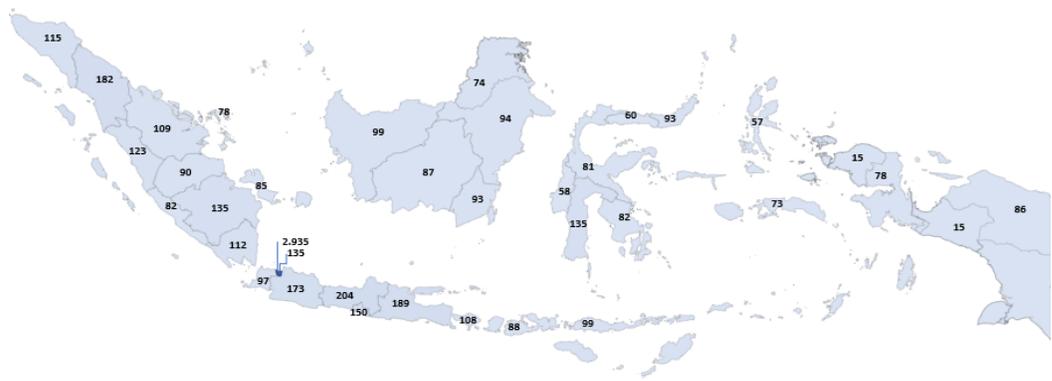
2) Fleksibilitas pengawasan BPKP

BPKP menjamin independensinya untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan dari aspek sifat, objek, dan lingkup penugasan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). BPKP fleksibel dalam menentukan jenis penugasan *assurance* maupun *consulting*, menetapkan objek entitas maupun program/proyek/kegiatan, menentukan luas cakupan pengawasan dan tingkatan jaminan (memadai atau terbatas). Selain itu, BPKP juga dapat melaksanakan pengawasan program/kegiatan lintas sektor yang menjadi perhatian presiden dan masyarakat. Dengan *trust* yang tinggi kepada BPKP, penugasan pengawasan BPKP di masa mendatang akan semakin banyak dari sisi jumlah dan menantang dari sisi kompleksitas dan tuntutan publik. Fleksibilitas ini terlihat dari perubahan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP untuk mengakomodir kebutuhan pengawasan oleh *stakeholders* yang dapat dilakukan dalam kondisi normal (melalui penajaman informasi hasil pengawasan (insilwas)/konvergensi di tengah tahun) serta kondisi khusus (instruksi khusus).

3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) - Kualitas SDM

Jumlah SDM BPKP per 5 Mei 2025 sebanyak 6.569 orang, dengan pembagian sebanyak 3.634 atau sekitar 55% tersebar di kantor perwakilan di seluruh Indonesia dan sebanyak 2.935 atau 45% menempati kantor pusat. Komposisi pegawai fungsional auditor (termasuk auditor selaku koordinator/subkoordinator) dan non auditor yaitu 64% berbanding 36%. Dari sebaran tingkat pendidikan, mayoritas pegawai telah menempuh jenjang S1, sehingga dengan komposisi auditor yang ada dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pengawasan yang optimal. Dalam jangka panjang, BPKP secara organisasi terus berupaya menjaga kuantitas dan kualitas SDM-nya melalui implementasi *grand design* standarisasi manajemen SDM khususnya aspek rekrutmen dan pengembangan. Hal ini ditujukan untuk menjaga keunggulan kompetitif maupun komparatif agar kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terjaga sesuai ekspektasi *stakeholder*.

Gambar 1.5 Peta SDM BPKP Per 5 Mei 2025 Menurut Lokasi



sumber: *Biro SDM, diolah*

- 4) Proses bisnis terstandar
BPKP mengacu pada SAIPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) untuk menjaga mutu pengawasan/audit secara profesional. BPKP telah menetapkan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai standar mekanisme proses bisnis sesuai Rencana Strategis (Renstra) serta tugas dan fungsi BPKP. Peraturan ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan atau pengembangan prosedur baku pelaksanaan kegiatan serta pedoman atau petunjuk teknis di lingkungan BPKP.
- 5) Instansi pembina APIP
BPKP selaku koordinator APIP K/L/D dapat mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan pengawasan untuk tercapainya sasaran strategis pusat dan daerah. Terdapat 19.712 SDM APIP, yang terdiri dari 4.587 orang di BPKP, 4.159

orang di kementerian dan lembaga, serta 10.966 orang di pemerintah provinsi dan kota (*Sumber: Pusbin JFA BPKP, 2024*). BPKP selaku pembina APIP terus mendorong APIP untuk dapat melaksanakan tugas fungsinya secara profesional dan akuntabel. BPKP juga mendorong pelaksanaan sinergi antar APIP guna meningkatkan cakupan ruang lingkup pengawasan, kualitas hasil pengawasan dan memberikan nilai tambah kepada *stakeholders*.

6) Infrastruktur Teknologi Informasi

BPKP telah memanfaatkan secara intensif infrastruktur teknologi informasi untuk kegiatan pengawasan maupun kegiatan pendukung pengawasan (*enabler*). BPKP telah mengembangkan Pengumpulan dan Evaluasi Berbasis Data Elektronik (PEBDE) untuk mendukung kegiatan pengawasan. PEBDE merupakan suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti dari piranti komputer atau media digital lainnya agar dapat dipergunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, BPKP juga mengembangkan *data analytics* yang melibatkan proses pembersihan data, transformasi data, pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu, dan pembuatan model untuk menemukan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP juga telah berbasis teknologi informasi, diantaranya penggunaan aplikasi SIA BLU/D, SIA Bumdes, Aplikasi Evran dan lain-lain. Untuk kegiatan operasional pengawasan secara umum, BPKP telah menerapkan sistem informasi pengawasan (SIMA) yang mengintegrasikan proses perencanaan pengawasan sampai dengan pelaporan hasil pengawasan. Untuk kegiatan pendukung pengawasan (*enabler*), BPKP telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis daring dan *paperless* seperti manajemen kepegawaian (MAP), perjalanan dinas (BISMA), persuratan dan disposisi (SADEWA dan Pionir). Terkait manajemen pengetahuan BPKP telah membangun *platform digital Knowledge Management System* (KMS) sebagai repositori ilmu yang mendukung ekspansi wawasan pengawasan, mengorganisir pengetahuan pengawasan sebagai aset berharga, dan berperan vital dalam dokumentasi serta diseminasi informasi untuk meningkatkan nilai jasa yang dihasilkan BPKP, serta *e-learning* Pusdiklatwas untuk pendidikan dan pelatihan internal BPKP maupun APIP. Untuk level individu, setiap pegawai BPKP telah mendapatkan fasilitas laptop dan *e-workspace* guna mempermudah dalam pelaksanaan tugas.

1.2.2 Peluang (*Opportunity*)

1) Kebutuhan pemerintah akan peran pengawasan untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dilaksanakan secara efektif.

BPKP selaku auditor presiden berfungsi untuk melakukan pengawasan atas tata kelola keuangan dan pembangunan. Peran pengawasan yang dimaksud yaitu untuk memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) atas praktik tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian intern (*internal control*) organisasi pemerintahan agar dapat mencapai tujuannya. Jaminan keyakinan tersebut diberikan dalam aspek kepatuhan dan kinerja (*value for money*).

Ruang lingkup pengawasan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diperkirakan memiliki tren meningkat memerlukan peran pengawasan yang kuat dan sistematis agar anggaran tersebut digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (akuntabel), ekonomis dan efisien serta program-kegiatan pemerintah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia (efektif). Dengan memperhatikan *system-based* tersebut, pengawasan perlu dilakukan sesuai prioritas. Pengurutan dari tingkat kegiatan-program-unit kerja secara individual sampai dengan lintas sektor yang selanjutnya diintegrasikan secara makro. Proses ini dilaksanakan agar anggaran pemerintah yang dikeluarkan dapat diyakini akuntabilitas dan efektivitasnya secara komprehensif.

- 2) Pengawasan atas isu yang berkembang di pemerintah/masyarakat.

BPKP memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pemecahan permasalahan yang bersifat segera melalui tugas pengawasan baik melalui inisiatif atau permintaan Presiden dan *stakeholder* lainnya. Pengawasan tersebut meliputi isu-isu publik maupun dinamika perkembangan yang signifikan terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik maupun regulasi di instansi pemerintahan maupun badan usaha. Kepercayaan (*trust*) kepada BPKP menjadi dasar *stakeholder* untuk permintaan pendapat atau pemecahan masalah publik yang dihadapi, baik dari aspek kepatuhan, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian dan *value for money*. Beberapa contoh aktual isu atau dinamika perkembangan publik yang menyita perhatian masyarakat luas dan akhirnya melibatkan BPKP dalam penanganannya antara lain:

- a) audit menyeluruh atas tagihan BPJS Kesehatan tahun 2018-2019;
- b) pendampingan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018;
- c) penanganan Pandemi *Covid-19* tahun 2020-2021;
- d) audit tata kelola industri kelapa sawit tahun 2022;
- e) audit harga, stok, dan distribusi minyak goreng tahun 2022;
- f) audit okupansi dan impor KRL tahun 2023; dan
- g) pendampingan penyelenggaraan PON tahun 2024.

- 3) Kepercayaan *Stakeholder*

Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang merupakan dampak dari efektivitas atas keberadaan suatu organisasi. Peran BPKP dalam struktur dan tata kelola pemerintah tetap terjaga dan dibutuhkan, walaupun ada pergantian pemerintahan setiap 5 (lima) tahun sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode tahun 2024 yang dilakukan oleh seluruh unit kerja BPKP, dengan total responden 9.187 stakeholders, rata-rata indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,25 (kategori BAIK). Hal ini membuktikan kredibilitas dan reliabilitas yang tinggi atas hasil pengawasan BPKP, yang telah dilaksanakan secara independen dan obyektif. Dalam 1 (satu) dekade ke belakang, Presiden Republik Indonesia (periode 2014 sampai dengan 2024) dan Presiden Republik Indonesia (periode 2024 sampai dengan sekarang) selalu mengungkapkan kepercayaan atas kapabilitas BPKP dalam mengawal akuntabilitas pemerintahan mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan

pembangunan secara nasional. Demikian juga, kepercayaan dari para menteri, gubernur, bupati, walikota yang selalu positif dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dengan banyaknya kerjasama, nota kesepahaman (MoU), dan permintaan layanan *assurance* serta *consulting*. Di luar struktur pemerintahan, BPKP juga dipercaya oleh lembaga di luar eksekutif seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), komisi independen, dan BUMN/BUMD/Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengawal pengelolaan akuntabilitas keuangan/kinerja.

1.2.3 Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan analisis hasil perhitungan formasi pegawai di BPKP tahun 2024 diperoleh simpulan bahwa BPKP masih membutuhkan tambahan pegawai sebanyak 4.764 orang untuk memenuhi kondisi ideal atau baru sebesar 53,18% formasi yang terisi. Jumlah kebutuhan pegawai per 2024 sebesar 10.175 pegawai, sedangkan jumlah yang terisi sebesar 5.411 pegawai termasuk penerimaan pegawai di 2024. Sedangkan dari sisi realisasi kegiatan operasional BPKP tahun 2024 yaitu 93,43% untuk penggunaan dana secara total dan 116,5% untuk beban jam/hari kerja pengawasan untuk penugasan *mandatory* APP BPKP. Secara standar, beban kerja untuk setiap SDM yaitu 200 hari penugasan per pegawai (dengan 1.250 jam efektif), sedangkan realisasi beban kerja yaitu 233 hari penugasan per pegawai untuk penugasan APP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kelebihan beban kerja pada pegawai BPKP. Dalam pelaksanaan pengawasan, terdapat tambahan penugasan penting di luar APP yang berakibat pada bertambahnya surat tugas berikut jam penugasan pengawasan per pegawai. Hal ini dikuatkan dengan hasil survei yang diselenggarakan pada akhir tahun 2024 terkait indeks kesehatan organisasi BPKP, beban penugasan pegawai/auditor telah *overload* - minimum 3 (tiga) surat penugasan per pegawai - menjadi isu kesehatan organisasi yang dominan baik di tingkat pusat maupun perwakilan.

Dengan meningkatnya *trust* kepada BPKP yang berdampak positif secara organisasi, maka BPKP harus siap melayani peningkatan permintaan *stakeholder*. Walaupun dengan kendala sumber daya yang ada, BPKP selalu berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada untuk mendukung capaian tujuan-sasaran pemerintahan dan ekspektasi *stakeholder*.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

1) Gugatan hukum atas Hasil Pengawasan

2) Konsekuensi BPKP sebagai lembaga pengawasan yaitu adanya risiko gugatan hukum atas pelaksanaan tugas pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, terutama pelaksanaan tugas keinvestigasian yang terkait kuat dengan aspek penegakan hukum. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang, BPKP menghadapi gugatan hukum sebanyak 13 kali pada tahun 2020, 28 kali pada tahun 2021, 18 kali pada tahun 2022, 15 kali pada tahun 2023, dan 17 kali pada tahun 2024. Total perkara yang sudah *inkracht* yaitu 83 dari 91 perkara. BPKP hanya kalah 1 (satu) kali dari 83 penanganan perkara gugatan tersebut, atau *success rate* 98.8%. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penugasan pengawasan BPKP telah dilaksanakan secara profesional dan objektif sesuai

standar. Walaupun demikian, BPKP sangat *concern* atas risiko gugatan hukum ini, mengingat bahwa gugatan hukum setidaknya berdampak 2 (dua) hal pada BPKP secara institusi yaitu penggunaan *resource* dan upaya ekstra di luar penugasan rutin untuk menghadapi gugatan, serta risiko penurunan reputasi dan kepercayaan jika BPKP menjadi pihak yang kalah dalam gugatan hukum.

3) Instansi lain yang memiliki kewenangan yang *overlapping* dengan BPKP

Beberapa lembaga dengan peran pengawasan seperti BPKP berdampak pada potensi atau persepsi adanya *overlapping* (tumpang tindihnya praktik pengawasan). Namun dari sudut pandang sinergitas, beberapa lembaga pengawasan tersebut dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan/negara yang lebih besar. Apabila ditinjau dari perspektif *system-based*, banyaknya lembaga pengawasan pada prinsipnya dapat dikolaborasikan untuk kemanfaatan pencapaian tujuan nasional walaupun bukan merupakan praktik yang efisien. BPKP dari sudut pandang positivisme (teori akademis dan kontribusi secara empiris) mengambil peran sebagai auditor internal pemerintah atau auditor presiden. Oleh karena itu, untuk menyikapi potensi *overlapping* pengawasan, BPKP telah berkomunikasi secara efektif dengan beberapa lembaga lainnya untuk sinergi pengawasan, seperti dengan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS), lembaga *ad hoc* pengawasan lain, serta mengoordinasikan pengawasan intern dengan inspektorat di tingkat pusat dan daerah.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPKP

2.1 Visi

Sebagai organisasi yang terus bertumbuh, BPKP menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dituju dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi, misi, dan tujuan strategis tersebut merupakan gambaran besar tentang cita-cita BPKP dalam mendukung visi dan misi pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Visi BPKP tahun 2025-2029 yaitu:

“Menjadi Auditor Presiden yang Andal dan Terpercaya dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden.”

Dalam visi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) kalimat kunci cita-cita masa depan yang dibangun dari kondisi saat ini, yaitu: 1) auditor presiden yang andal, 2) auditor presiden yang terpercaya, dan 3) mewujudkan visi misi Presiden. Pengertian dan pemahaman atas 3 (tiga) kata kunci tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Auditor Presiden yang Andal

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, BPKP memegang peranan penting dan strategis dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. BPKP bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional. BPKP juga secara khusus diberi mandat dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan bersih. Pentingnya posisi dan peran BPKP tersebut menuntut BPKP untuk menjadi auditor presiden yang andal, serta menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, standar dan prinsip yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) menjadi pedoman penting dalam membentuk kompetensi, integritas, dan profesionalisme auditor intern pemerintah. Auditor intern pemerintah yang andal ditunjukkan melalui sikap objektif, independen, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas audit secara efektif.

Auditor intern pemerintah yang andal tidak hanya bertugas menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berperan membantu entitas pemerintah meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Auditor intern pemerintah yang andal harus bersifat proaktif mendorong K/L/D/BU untuk aktif mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi yang bernilai. Auditor intern pemerintah yang andal juga harus memahami konteks strategis organisasi, kebijakan publik, serta ekspektasi *stakeholders*. Dengan demikian, BPKP mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan lembaga pemerintahan.

Lebih lanjut, seorang auditor intern pemerintah yang andal harus menjunjung tinggi kode etik profesi, yang mencakup integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Selain itu, keberhasilan auditor intern pemerintah juga bergantung pada kemampuannya berkomunikasi secara efektif, baik dalam menyusun laporan yang jelas dan meyakinkan, maupun dalam berdialog dengan manajemen untuk mendorong implementasi rekomendasi audit.

Auditor intern pemerintah yang andal bertindak sebagai penjaga kepentingan publik, memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga membantu mendeteksi dan mencegah kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, auditor intern pemerintah dapat meningkatkan kualitas audit, memperkuat reputasi institusinya, memberikan manfaat nyata bagi *stakeholder* serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, membangun auditor intern pemerintah yang andal bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian integral dari reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Auditor Presiden yang Terpercaya

Peran BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan telah menempatkan BPKP sebagai mitra strategis Presiden dan K/L/D/BU dalam mencapai tujuan pembangunan. Sebagai auditor Presiden, BPKP berkomitmen untuk terlibat aktif sebagai pemberi saran yang terpercaya melalui komunikasi yang efektif, hubungan yang kuat, dan komitmen untuk berkembang bersama, sehingga dapat mendorong perubahan yang positif baik dari sisi BPKP sebagai institusi pengawasan maupun mitra strategisnya. Hal ini sejalan dengan budaya organisasi unggul di BPKP yang dibentuk melalui nilai-nilai positif (*value*) yang diyakini dan dipraktikkan oleh setiap individu BPKP, yaitu: profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel yang disingkat PIONIR atau bermakna harfiah perintis. *Value* tersebut diwujudkan dengan menjadi perintis dalam mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berkenaan hal tersebut, setiap insan BPKP memiliki posisi yang strategis dan signifikan sebagai auditor presiden. Peran selaku auditor dijabarkan sebagai kemampuan untuk memberikan rekomendasi pengawasan berbasis data untuk perbaikan akuntabilitas, kinerja, dan proses bisnis kepada *stakeholders*. Peran ini menunjukkan kematangan BPKP untuk memberikan nilai tambah yang lebih baik, tidak hanya pemberi jaminan atas kepatuhan. BPKP juga berperan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan menggunakan pendekatan analitis yang lebih maju, termasuk *benchmarking* terhadap praktik-praktik terbaik. Selain itu, BPKP juga berperan untuk membangun reputasi, di masyarakat maupun *stakeholder*, melalui pemberian rekomendasi yang andal dan relevan. Perwujudan “Auditor Presiden yang Terpercaya” sejalan dengan komitmen BPKP untuk selalu “Hadir Bermanfaat”, dengan menjadi lembaga yang aktif dan memberikan kontribusi positif dalam perbaikan tata kelola keuangan dan pembangunan.

2.1.3 Mewujudkan Visi Misi Presiden

Kementerian/lembaga, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Presiden. Visi dan misi Presiden berfokus pada membangun Indonesia dengan visi besar “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tujuan utama Visi ini yaitu mencapai

masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis serta berdaulat melalui penguatan persatuan bangsa. Visi ini diwujudkan dalam delapan misi utama atau “Astacita,” yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan untuk mengakomodasi perkembangan Indonesia secara inklusif. Seluruh Kementerian/lembaga, tak terkecuali BPKP, harus mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara efektif untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Gambar 2.1 Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden RI



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029

BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, memainkan peran strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden, dengan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, auditor intern pemerintah berperan sebagai *mitra strategis* dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dengan memberikan *assurance* dan *insight* yang objektif terhadap pelaksanaan program pemerintah, auditor intern pemerintah membantu memastikan bahwa sumber daya negara dikelola secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kontribusi utama auditor intern pemerintah yaitu dalam menilai apakah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sudah mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan Presiden. Sebagai auditor presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar langsung fakta di lapangan dan memberikan respon berupa informasi asurans dan konsultasi melalui sistem pengawasan untuk menghasilkan informasi akuntabilitas. BPKP juga memberikan masukan mulai tahap perencanaan, sehingga potensi kegagalan dalam pelaksanaan program dapat dicegah sejak dini.

Lebih dari itu, peran auditor presiden juga penting dalam membangun budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi. Dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme, auditor presiden mendukung reformasi birokrasi yang menjadi bagian dari misi Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, peran ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat pencapaian visi misi presiden.

2.2 Misi

Misi Presiden dituangkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional atau “Asta Cita”. Dalam konteks tersebut, BPKP secara kelembagaan mengemban amanah untuk mendukung pencapaian Asta Cita ke-7, yaitu: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Peran BPKP ini difokuskan pada pelaksanaan Program Prioritas Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan, serta Kegiatan Prioritas Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) Proyek Prioritas, yaitu Pengendalian Program Prioritas Presiden dan Pengendalian Intern dan Pengawasan Pembangunan.

Dalam menuju visi BPKP sebagaimana telah disebutkan di atas dan mendukung pencapaian misi Presiden, terdapat misi yang akan dilakukan BPKP, yaitu:

“Membantu Presiden dalam Menjaga Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.”

Dalam misi tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kalimat kunci cita-cita masa depan yang dibangun dari kondisi saat ini, yaitu 1) Menjaga Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan, serta 2) Menjaga Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Pengertian dan pemahaman atas 2 (dua) kata kunci tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Menjaga Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

Pernyataan tersebut merupakan perwujudan langsung dari tugas BPKP sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dengan tetap memegang teguh prinsip independensi selaku auditor intern pemerintah. Pengawasan intern BPKP juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian, pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat dan tujuan pembangunan nasional dapat lebih terwujud. Selain itu, dalam menjalankan peran BPKP sebagai auditor intern bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BPKP juga perlu memastikan hasil pengawasan intern disampaikan secara efektif, tepat waktu, dan tepat menjawab kebutuhan tidak hanya Presiden, namun juga kebutuhan para Menteri dan Kepala Daerah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah (baik individu, lembaga, atau pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, negara harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Akuntabilitas keuangan negara setidaknya mencakup:

- 1) Perencanaan anggaran yang transparan
Pemerintah harus menyusun anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien
Dana yang digunakan harus sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat secara maksimal dengan sumber daya optimal.
- 3) Pelaporan dan audit
Setiap penggunaan anggaran harus dilaporkan dan diaudit oleh lembaga yang berwenang.

Kemudian dalam konteks akuntabilitas pembangunan nasional setidaknya mencakup:

- 1) Penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan data yang valid.
- 2) Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan tepat sasaran.
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BPKP juga harus berakuntabilitas bagi dirinya sendiri dalam fungsinya memberikan *assurance* atau jaminan memadai atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Untuk meningkatkan sistem akuntabilitas ini, maka BPKP akan terus mengembangkan sistem pengendalian intern dan/atau manajemen risiko di lingkungan internal BPKP.

2.2.2 Menjaga Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Pernyataan tersebut merupakan wujud komitmen BPKP untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial secara akuntabel dan transparan. Dalam konteks kebijakan publik, pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan kerangka prinsip dan proses untuk mengelola sumber daya negara secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, inklusif, dan sesuai hukum, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang bersih atau *clean government* merupakan kondisi hasil dari penerapan *good governance*, di mana penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta berlandaskan integritas dan etika tinggi. Sebagai auditor presiden, BPKP memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui pengawasan keuangan dan pembangunan. Dengan melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKP berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

2.3. Tujuan

Dalam menyelenggarakan kedua misinya, BPKP menetapkan 2 (dua) tujuan, yakni:

- 1) Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional
Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa renstra ini yang menunjukkan keberhasilan BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara; dan
 - b) Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden oleh BPKP.
- 2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan hasil yang diharapkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada akhir periode 2025-2029. Tujuan ini diukur dengan indikator: "Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi" baik pada level K/L, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis menggambarkan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan setiap tahunnya oleh BPKP pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Pada periode tahun 2025-2029, BPKP memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
Pengawasan BPKP terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah difokuskan pada penambahan kemampuan fiskal negara dan daerah. Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator, yaitu "Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara". Indikator tersebut merupakan hasil perhitungan kumulatif dari 3 komponen yaitu:
 - a) Nilai potensi penerimaan negara/daerah
Nilai potensi penerimaan negara/daerah merupakan sejumlah nilai finansial yang dapat dioptimalkan untuk menambah penerimaan negara/daerah berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP. Pada pemerintah pusat, hal tersebut di antaranya dapat bersumber dari potensi optimalisasi pajak, bea dan cukai, PNBPN, serta sumber penerimaan lainnya. Pada pemerintah daerah, optimalisasi dapat bersumber dari potensi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
 - b) Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien
Komponen ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien yaitu nilai rupiah yang dapat dihemat dan atau dicegah keluar dari kas negara/daerah berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP.
 - c) Nilai penyelamatan keuangan negara
Komponen ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset negara. Nilai penyelamatan keuangan negara yaitu nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan kerugian keuangan negara/daerah atas realisasi belanja dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara, termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional.

Sasaran strategis 2 menggambarkan dampak positif dari pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program-program prioritas pemerintah dan kemanfaatan pengawasan melalui sudut pandang *stakeholder/mitra* BPKP yang mendapatkan manfaat langsung dari pengawasan BPKP. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 indikator, yaitu “Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden oleh BPKP” dan “Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP”.

a) Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden oleh BPKP
Indikator ini menggambarkan manfaat langsung pengawasan BPKP atas pencapaian indikator dan target dari isu/ sektor program/kegiatan yang menjadi fokus perhatian presiden/pemerintah yang tertuang dalam APP BPKP.

b) Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP

Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP merupakan ukuran sejauh mana hasil pengawasan BPKP dimanfaatkan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP diukur dalam bentuk indeks, yang merupakan hasil perhitungan komposit dari 3 (tiga) komponen yaitu:

(1) Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP merupakan agregasi dari persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dari seluruh unit kerja BPKP, yang menggambarkan sejauh mana rekomendasi BPKP telah ditindaklanjuti oleh para Entitas Mitra.

(2) Pemanfaatan Hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) dalam proses pengendalian kecurangan
Komponen tersebut menggambarkan sejauh mana laporan pengawasan investigatif yang diterbitkan BPKP dalam periode tertentu dapat dimanfaatkan dalam proses pengendalian kecurangan.

(3) Hasil Survei Kualitas Pengawasan BPKP

Komponen Hasil Survei Kualitas Pengawasan BPKP menggambarkan ukuran kualitatif persepsi kepuasan Entitas Mitra atas kualitas pengawasan BPKP. Komponen tersebut disusun berdasarkan hasil survei kepada para Entitas Mitra kunci sebagai media *confirmatory/feedback* atas kualitas pengawasan BPKP.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU

Kinerja BPKP diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola K/L/D/BU. Sasaran strategis 3 BPKP diukur dalam 3 ukuran, yaitu Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi, Kapabilitas APIP, dan Maturitas Manajemen Risiko Badan Usaha (BU) dan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), yang kemudian dirinci lagi dalam 9 (sembilan) indikator kinerja utama, yaitu:

a) Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi

Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi mencerminkan suatu entitas (K/L/D) telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, membangun pengendalian, serta

mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko kecurangan) pada seluruh program dan kegiatan organisasi. BPKP menetapkan 3 (tiga) indikator yaitu:

- (1) Persentase K/L dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat maturitas SPIP pada level K/L secara nasional, dengan membandingkan jumlah K/L yang telah memiliki maturitas SPIP karakteristik berbasis terdefinisi dengan jumlah populasi K/L.

- (2) Persentase Pemerintah Provinsi dengan SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat maturitas SPIP pada level Pemerintah Provinsi secara nasional, dengan membandingkan jumlah Pemerintah Provinsi yang telah memiliki maturitas SPIP karakteristik berbasis terdefinisi dengan jumlah populasi Pemerintah Provinsi di Indonesia.

- (3) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat maturitas SPIP pada level Pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional, dengan membandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki maturitas SPIP karakteristik berbasis terdefinisi dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

b) Kapabilitas APIP

Indikator Kapabilitas APIP merupakan indikator yang sudah ada pada periode Renstra sebelumnya. Indikator ini masih menjadi indikator untuk periode Renstra 2025-2029 karena adanya penajaman model pengukuran dan perubahan populasi, serta nomenklatur K/L/D. BPKP mendorong dan menargetkan tingkat Kapabilitas APIP K/L/D minimal pada level 3. Kapabilitas APIP \geq level 3 menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas), peringatan dini, dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L.

BPKP menetapkan 3 (tiga) indikator yaitu:

- (1) Persentase K/L dengan APIP \geq level 3

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat kapabilitas APIP pada level K/L secara nasional, dengan membandingkan jumlah K/L yang telah memiliki kapabilitas APIP \geq level 3 dengan jumlah populasi K/L.

- (2) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq level 3

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat kapabilitas APIP pada level pemerintah provinsi secara nasional, dengan membandingkan jumlah pemerintah provinsi yang telah memiliki kapabilitas APIP \geq level 3 dengan jumlah populasi pemerintah provinsi di Indonesia.

- (3) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq level 3.

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat kapabilitas APIP pada level pemerintah kabupaten/kota secara nasional, dengan

membandingkan jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki kapabilitas APIP \geq level 3 dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

c) **Maturitas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah**

Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan BU dan BLU/BLUD. BPKP mendorong dan menargetkan tingkat Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang baik. Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang baik ditujukan untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai pada Badan Usaha dan Badan Layanan.

BPKP menetapkan 3 (tiga) indikator yaitu:

(a) **Persentase BUMN dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik**

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat maturitas manajemen risiko pada level BUMN secara nasional, dengan membandingkan jumlah BUMN yang telah memiliki Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang baik dengan jumlah populasi BUMN mitra BPKP.

(b) **Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik**

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat maturitas manajemen risiko pada level BUMD secara nasional, dengan membandingkan jumlah BUMD yang telah memiliki Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang baik dengan jumlah populasi BUMD mitra BPKP.

(c) **Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik.**

Indikator ini menggambarkan capaian tingkat maturitas manajemen risiko pada level BLU/BLUD secara nasional, dengan membandingkan jumlah BLU/BLUD yang telah memiliki Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang baik dengan jumlah populasi BLU/BLUD mitra BPKP.

4) **Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BPKP**

Kualitas tata kelola BPKP mencerminkan kemampuan pengelolaan atas sumber daya internal BPKP dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Sasaran Strategis 4 ini yaitu Kapabilitas Pengawasan BPKP. Kapabilitas Pengawasan BPKP merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Pengukuran ini dilakukan dengan mengacu pada enam elemen, yaitu:

- a) peran dan layanan BPKP;
- b) pengelolaan SDM;
- c) praktik pengawasan BPKP;
- d) akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- e) budaya dan hubungan organisasi; dan
- f) struktur dan tata kelola.

Atas indikator sasaran strategis tersebut, telah diidentifikasi beberapa risiko yang mempengaruhi pencapaian target capaian sasaran strategis BPKP yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPKP

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Gugatan hukum terhadap hasil pengawasan BPKP	Penguatan Kepatuhan sesuai Standar Pengawasan	Para Deputi
		Pegawai melakukan tindakan fraud	Pembentukan Karakter Inti Pengawasan	Sekretaris Utama
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Hasil pengawasan BPKP tidak strategis	Penguatan Manajemen Isu Strategis dalam Penyusunan APP	Para Deputi
		Rekomendasi pengawasan BPKP tidak menjawab permasalahan nasional	Penguatan Kualitas Pelaksanaan sesuai Standar Pengawasan	Para Deputi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU	Rekomendasi pengawasan BPKP tidak menjawab permasalahan penyelenggaraan tata kelola K/L/D/BU	Penguatan Kualitas Pelaksanaan sesuai Standar Pengawasan	Para Deputi
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP	Pegawai tidak menjalankan pengawasan sesuai standar	Penguatan Kepatuhan sesuai Standar Pengawasan	Para Deputi
		Kebocoran Informasi Pengawasan	1. Penguatan Kepatuhan sesuai Standar Pengawasan	Para Deputi
			2. Penguatan Infrastruktur TI	Sekretaris Utama

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

3.1.1 Pengawasan BPKP untuk Keberhasilan Pembangunan/RPJM
RPJM 2025-2029 menjadi tahapan pertama atas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang ditujukan untuk mewujudkan perkuatan pondasi transformasi. RPJM 2025-2029, yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden, mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut akan dicapai melalui 8 (delapan) Prioritas Nasional yang disebut sebagai Asta Cita Presiden terpilih periode 2025-2029.

Gambar 3.1 Prioritas Nasional (Asta Cita) RPJM 2025-2029



sumber: dokumen RPJM 2025-2029

Asta Cita tersebut memuat 17 (tujuh belas) program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.2 Struktur Program Prioritas Presiden dalam RPJMN 2025-2029

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Pemerintahan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hillirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

sumber: dokumen RPJMN 2025-2029

Asta Cita diharapkan mampu menjadi pengungkit (*leverage*) tercapainya 5 (lima) sasaran utama pembangunan nasional, yaitu (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan (5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*. Program prioritas Presiden tersebut kemudian diuraikan ke dalam RPJMN tahun 2025-2029 sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029. RPJMN tersebut memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro, termasuk di dalamnya peran dan fungsi BPKP.

BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, memiliki tugas melakukan pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dalam mencapai visi misi Presiden. Secara spesifik, peran pengawasan BPKP pada Lampiran II RPJMN 2025-2029 melekat pada Prioritas Nasional (PN) ke-7, Program Prioritas ke-8, dan Kegiatan Prioritas ke-3.

Gambar 3.3. Peran Khusus BPKP dalam RPJMN 2025-2029



sumber: dokumen RPJMN 2025-2029

3.1.2 Kontribusi BPKP Membangun Pengendalian Intern Pemerintahan yang Efektif dan Penguatan Peran APIP

Penguatan pengendalian intern merupakan respons atas lemahnya kualitas tata kelola yang berdampak langsung pada rendahnya efektivitas pelayanan publik dan capaian pembangunan nasional/daerah. Untuk menyelesaikan isu tersebut, BPKP perlu berperan melakukan penguatan kualitas pengendalian intern pemerintah secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Peran tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan Maturitas SPIP Terintegrasi, Penguatan efektivitas Kapabilitas APIP. Peran strategis BPKP lainnya yaitu terkait perbaikan manajemen risiko (MR), penguatan manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN), dan penguatan efektivitas pengendalian korupsi pada K/L/D/BU. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui kebijakan penilaian yang berorientasi hasil, mengedepankan pembinaan berkelanjutan dan terlibat mendorong penyempurnaan regulasi.

3.2 Kebijakan Pengawasan Jangka Menengah BPKP

Arah kebijakan pengawasan BPKP disusun untuk memberikan dasar yang kuat untuk strategi dan pendekatan/metodologi pemecahan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. Kebijakan pengawasan BPKP berprinsip pada *assurance*, *insight*, dan *objectivity*, serta mempertimbangkan cara yang efektif untuk mencapai *output* dan *outcome* program pengawasan yang merujuk pada akuntabilitas yang diharapkan pada RPJMN. Kebijakan pengawasan menjadi garis besar dan dasar rencana untuk merancang agenda program prioritas pengawasan BPKP yang ditetapkan secara tahunan. Secara umum kebijakan pengawasan BPKP untuk periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan BPKP

Peningkatan kualitas hasil pengawasan mutlak diperlukan sehubungan dengan tantangan peran pengawasan BPKP yang semakin meningkat dan kompleks. Presiden pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Tahun 2024 telah menekankan peran penting pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP khususnya dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Pengawasan BPKP ini ditujukan agar APBN/D tersebut

dapat menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta mampu mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Harapan presiden ini menjadi sangat krusial jika dikaitkan dengan kondisi proses pembangunan nasional yang saat ini masih dihadapkan pada ketidakstabilan perekonomian global dan situasi geopolitik.

BPKP terus menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dilaksanakan guna merespons hal tersebut. BPKP mengedepankan pencegahan penyimpangan (*fraud*), mengawal gerak cepat dan tepat pemerintah, memanfaatkan kecanggihan teknologi, serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembangunan. Selain itu, diperlukan ketepatan prioritas pengalokasian sumber daya pengawasan agar mampu mengawal kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran dan belanja negara/daerah yang akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan menjadikan “Meningkatnya Pemanfaatan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan” sebagai Sasaran Strategis BPKP, serta Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan sebagai Sasaran Program.

Pengawasan BPKP mengacu pada standar audit yang berlaku secara nasional, yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk kepentingan standarisasi kerja, peningkatan kinerja, pengelolaan risiko, dan penjaminan kualitas hasil pengawasan. BPKP juga selalu memutakhirkan praktik pengawasan berdasarkan perkembangan *best practice* pengawasan, baik yang berlaku nasional maupun internasional, dan menginternalisasikannya melalui Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis BPKP.

3.2.2 Mendorong Pemanfaatan Hasil Pengawasan

BPKP berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. Rekomendasi hasil pengawasan dapat memberikan hasil yang optimal apabila ditindaklanjuti oleh *stakeholder* atau entitas mitra selaku objek pengawasan. Oleh karena itu, BPKP secara aktif harus memastikan hasil pengawasannya ditindaklanjuti oleh objek pengawasan serta mengkomunikasikannya kepada pimpinan tertinggi K/L/D/BU secara berkala.

3.2.3 Penguatan APP

Pengawasan BPKP akan difokuskan pada capaian program prioritas nasional, isu-isu yang menjadi perhatian presiden dan isu yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan APP yang merupakan peta *priority product delivery* kepada presiden serta *stakeholders* BPKP. APP merupakan rujukan untuk menghasilkan produk pengawasan, sekaligus memberikan kejelasan prioritas pengawasan, informasi hasil pengawasan, waktu *delivery*, dan unit penanggung jawab. APP disusun dengan mengacu pada RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), APBN, Advertorial APBN, arahan langsung Presiden kepada BPKP, dan isu yang berkembang di masyarakat serta hasil monitoring media. APP yang telah ditetapkan bersifat dinamis, sehingga prioritas pengawasan BPKP dapat berubah sesuai dengan perkembangan isu strategis terkini. Hal ini ditujukan agar APP dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders* dan masyarakat.

3.3 Strategi Pengawasan Jangka Menengah BPKP

BPKP menyusun strategi jangka menengah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai visi dan misi jangka panjang, serta mengelola operasional sehari-hari secara lebih efektif. Strategi tersebut bersifat fleksibel, artinya memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan situasi dan kebutuhan di masa mendatang, sehingga organisasi dapat beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. BPKP memformulasikan strategi pengawasan jangka menengah sebagai berikut:

3.3.1 Agilitas topik pengawasan

BPKP memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pemecahan permasalahan yang bersifat segera melalui tugas pengawasan baik melalui inisiatif atau permintaan Presiden dan *stakeholder* lainnya. Pengawasan tersebut meliputi isu-isu yang menjadi perhatian presiden maupun menjadi permasalahan masyarakat yang berdampak luas dan segera diselesaikan secara cepat. Prioritas pengawasan BPKP senantiasa disesuaikan dengan perkembangan isu strategis terkini. Hal ini ditujukan agar hasil pengawasan BPKP dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders* dan masyarakat.

3.3.2 Konvergensi Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional

BPKP mengemban tanggung jawab untuk meyakinkan capaian kinerja prioritas pembangunan nasional untuk tetap *on the track* sesuai target perencanaan dan harapan presiden. APP yang dirancang tiap tahun menitikberatkan pengawasan pada program prioritas nasional, dan lebih lanjut secara teknis menyusun desain, pelaksanaan dan pelaporannya. Pengawasan didesain secara konvergen dengan mengikutsertakan seluruh elemen unit kerja pengawasan dan entitas mitra. Konvergensi pengawasan bertujuan untuk menjamin berbagai kegiatan pengawasan oleh seluruh elemen unit kerja dapat menyasar 1 (satu) simpulan besar sehingga lebih bernilai guna bagi *stakeholder* BPKP, khususnya dalam perbaikan kebijakan.

3.3.3 Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara

Pengawasan dari aspek akuntabilitas keuangan negara meliputi akuntabilitas penerimaan dan pelaksanaan belanja pemerintah. Pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja penerimaan negara diarahkan pada upaya BPKP membantu Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan ruang fiskal. Pengawasan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, baik sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Di sisi belanja, pengawasan terhadap rencana dan realisasi anggaran diperlukan untuk meyakinkan aspek akuntabilitas dan efektivitas hasil belanja pemerintah.

3.3.4 Pengendalian Kecurangan

Pengendalian kecurangan dilakukan secara preemtif, preventif dan represif. Aspek preemtif dan preventif kecurangan dititikberatkan pada peningkatan pemahaman akan risiko *fraud*/kecurangan dan pencegahannya. Pengawasan preemtif kecurangan di lingkungan pemerintahan dilakukan dengan edukasi, pelatihan-pendidikan, pembinaan, dan peningkatan pemahaman di lingkungan K/L/D/BU serta kelompok masyarakat. Pengawasan preventif dilakukan melalui mekanisme yang selama ini telah berjalan dan disempurnakan secara periodik, khususnya terkait: *fraud control plan*, manajemen risiko, dan pengendalian internal tematik. Pengawasan bersifat represif dilakukan untuk mengendalikan dan memulihkan eksposur dari kecurangan yang telah terjadi. Beberapa *tools* pengawasan bersifat represif ini antara lain: audit tujuan

tertentu lainnya bidang investigasi (ATTLBI), audit investigatif, pemberian keterangan ahli, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara. BPKP telah menjalin kerja sama dan kesepahaman yang baik dengan pihak aparat penegak hukum yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan KPK RI dalam menjalankan pengawasan yang bersifat represif tersebut.

3.3.5 Pembangunan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

BPKP melaksanakan kegiatan *assurance* maupun *consulting* dalam hal pembangunan sistem tata kelola yang baik (*good governance*) dalam struktur pemerintahan, termasuk entitas BUMN, BUMD, BLU, BLUD, Pemerintahan Desa dan BUMDes. Pembangunan sistem dimaksud antara lain sistem manajemen keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola, dan pencegahan korupsi. Pembangunan sistem ini ditujukan untuk memperkuat aspek kepatuhan, ekonomi, efisiensi, peningkatan kinerja, efektivitas dan kemanfaatan dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan dan badan usaha guna mencapai target pembangunan nasional.

3.3.6 Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan

Sinergi pengawasan menjadi salah satu strategi kunci pengawasan internal yang lebih efektif dan berdampak mengingat objek pengawasan yang luas, cakupan pengawasan dengan entitas yang tersebar, serta spektrum pengawasan yang sangat beragam dan kompleks. Sebagai koordinator APIP, BPKP akan mengembangkan pengawasan kolaboratif dengan melibatkan APIP kementerian/lembaga pemerintah, APIP daerah provinsi, APIP daerah kabupaten/kota, BPK, aparat penegak hukum, dan institusi lain yang berkaitan dengan pengawasan dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan. Koordinasi dan kolaborasi dapat berbentuk pengawasan bersama, pendampingan pengawasan, sosialisasi, pertukaran informasi, dan peningkatan kompetensi pengawasan.

3.3.7 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM BPKP

Rencana pengembangan SDM BPKP berfokus pada peningkatan keahlian dan keterampilan di bidang teknis pengawasan, manajemen pengawasan, pengembangan kepemimpinan, dan mempromosikan budaya pembelajaran berkelanjutan. Dalam hal ini pengembangan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas)/*Government Internal Audit Corporate University* (GIA Corpu) BPKP, termasuk penyelenggaraan sertifikasi profesi dan keahlian melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP. Program-program pendidikan dan pelatihan telah menjadi *center of excellence* pengembangan SDM audit internal baik di BPKP, maupun di K/L/D, termasuk BUMN/D. BPKP juga mengembangkan infrastruktur dan kurikulum pendidikan dan pelatihan melalui sistem terintegrasi *learning management system* (LMS) yang dapat diakses oleh para peserta pendidikan dan pelatihan secara fleksibel. Penguatan kelembagaan Pusdiklatwas BPKP dilakukan melalui pembentukan balai pendidikan dan pelatihan pada 3 (tiga) lokasi yaitu Medan, Denpasar, dan Makassar. Selain itu, Pusdiklatwas BPKP juga akan memodernisasi sarana prasarana yang dilengkapi dengan teknologi modern untuk mendukung sesi pelatihan tatap muka dan *hybrid*. Dengan peningkatan kompetensi SDM BPKP disertai implementasi teknologi pengawasan diharapkan mampu memenuhi peningkatan permintaan *stakeholder*.

Untuk memenuhi aspek kuantitas sumber daya, BPKP akan melakukan upaya perekrutan ASN dengan membuka formasi CPNS. Selain itu, untuk mengantisipasi kebijakan moratorium pengadaan CPNS, BPKP membuka kesempatan pengangkatan Auditor melalui Alih Jabatan Non-Auditor. Seluruh ASN ditempatkan secara proporsional di unit kerja untuk memenuhi ketersebaran.

3.3.8 Penguatan Kelembagaan BPKP melalui Struktur Organisasi yang *Agile*

BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang andal dan terpercaya perlu memantau secara terus menerus dan mengadaptasi struktur organisasi yang *agile* untuk dapat merespon secara cepat tuntutan dan dampak dinamika perkembangan kebutuhan *stakeholder*. BPKP terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam perubahan dinamika pemerintahan ke dalam struktur dan proses bisnis pengawasan, terutama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara.

3.3.9 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan

BPKP memiliki posisi yang strategis karena berada langsung dibawah pimpinan tertinggi organisasi pemerintahan (presiden) dan pelaksanaan kewenangan BPKP tidak mengalami pembatasan ruang lingkup yang meliputi pengawasan terkait akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Ruang lingkup pengawasan yang semakin luas ini dikuatkan dengan diterbitkannya beberapa Instruksi Presiden yang menyebutkan peran BPKP secara langsung untuk melakukan pengawasan mulai dari data tunggal sosial hingga optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Cakupan pengawasan juga semakin besar karena objek pengawasan yang sangat beragam mulai dari pengawasan di sektor pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga percepatan pembentukan koperasi merah putih. Kondisi ini semakin mendorong BPKP untuk mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana dalam melakukan pengawasan. Penguatan sarana bidang TIK di BPKP sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan pengambilan keputusan/kebijakan pengawasan. Penguatan sarana TIK memungkinkan BPKP untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan *stakeholder*. BPKP mengelola sumber daya TIK dalam *framework of Enterprise Architecture (EA)*. Melalui EA, seluruh unit kerja di lingkungan BPKP akan didukung oleh manajemen TIK terintegrasi (aplikasi, infrastruktur, dan keamanan) yang diharapkan mampu memberikan dampak pada proses bisnis, dan memenuhi *outcome* yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKP serta mewujudkan layanan digital yang terintegrasi di lingkungan BPKP. Selain penguatan infrastruktur standar TIK, BPKP dalam jangka menengah akan mengadopsi infrastruktur yang lebih maju sesuai *best-practice* seperti *cloud computing*, *big data analytics*, dan sistem keamanan siber yang mutakhir. BPKP juga berencana mengimplementasikan pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) agar dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan prediktif, membantu organisasi dalam merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan TIK bagi pegawai juga didesain untuk memastikan bahwa mereka mampu memanfaatkan teknologi

tersebut secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Untuk kegiatan pendukung pengawasan (*enabler*), BPKP telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis daring dan *paperless* seperti manajemen kepegawaian (MAP), perjalanan dinas (BISMA), serta persuratan dan disposisi (PIONIR). Terkait manajemen pengetahuan, BPKP telah membangun sistem *knowledge management system* (KMS) untuk berbagi pengetahuan lingkup internal BPKP dan *e-learning* Pusdiklatwas untuk pendidikan dan pelatihan internal BPKP maupun APIP.

3.3.10 Penguatan Manajemen Pengetahuan dan Informasi Pengawasan

Pengawasan berkembang terus sesuai dengan kemajuan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Hasil Pengawasan akan disintesis menjadi pengetahuan pengawasan. BPKP berkomitmen menjadi organisasi pembelajar, salah satunya dengan mengelola pengetahuan pengawasan. Pengetahuan pengawasan ini akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pengawasan berikutnya. Saat ini BPKP telah mengembangkan KMS yang dapat diakses oleh seluruh pegawai BPKP.

Selain itu, BPKP juga mengembangkan Manajemen data dan Informasi Pengawasan melalui *Big Data* dan *Data analytics* yang melibatkan proses pembersihan data, transformasi data, pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu, dan pembuatan model untuk menemukan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengawasan yaitu akurat, lengkap, dan dapat diandalkan.

BPKP akan terus mengembangkan sistem manajemen data dan informasi pengawasan yang terintegrasi dan aman untuk memastikan bahwa auditor dapat mengakses informasi secara akurat dan melakukan analisis mendalam. Dengan manajemen data dan informasi yang efektif, risiko pengawasan dapat dikelola dengan efektif sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pengawasan, yang berujung pada efektivitas pengawalan pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kepercayaan *stakeholders* terutama Presiden.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam menjalankan mandat utamanya sebagai pengawas keuangan dan pembangunan negara/daerah, BPKP mendapat beberapa penugasan khusus dari presiden, yaitu melalui:

- a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan, Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- c) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras serta Penyaluran Cadangan Pangan Beras Pemerintah;
- d) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;

- e) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan
- f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, BPKP juga mendapatkan mandat untuk memastikan penyelenggaraan pengendalian intern berjalan secara optimal pada K/L/D/BU dan peningkatan kapabilitas APIP K/L/D.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diperlukan regulasi dan/atau kebijakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Identifikasi kebutuhan regulasi untuk mendukung kegiatan pengawasan tahun 2025-2029 antara lain:

1. Regulasi atau kebijakan tentang sinergi dan kolaborasi pengawasan BPKP, yang mengatur pola hubungan dengan APIP dan pemeriksa eksternal pemerintah;
2. Regulasi atau kebijakan tentang agilitas dan konvergensi pengawasan BPKP, yang mengatur fleksibilitas topik pengawasan prioritas dan pola hubungan antar direktorat dalam melaksanakan pengawasan;
3. Regulasi atau kebijakan tentang pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, yang mengatur tata cara tindak lanjut dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP;
4. Regulasi atau kebijakan tentang Pemutakhiran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengukuran Maturitas SPIP yang mengatur strategi pembinaan dan tata cara evaluasi maturitas SPIP;
5. Regulasi atau kebijakan tentang Pemutakhiran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengukuran Kapabilitas APIP yang mengatur strategi pembinaan dan tata cara penilaian Kapabilitas APIP;
6. Regulasi atau kebijakan tentang Pemutakhiran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengukuran Manajemen Risiko Badan Usaha (MR BU), yang mengatur strategi pembinaan dan tata cara evaluasi MR BU;
7. Regulasi atau kebijakan tentang Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan (*Continuous Audit Continuous Monitoring/CACM*), yang mengatur pelaksanaan CACM dalam mendukung pengawasan prioritas presiden;
8. Regulasi atau kebijakan tentang Penguatan Kompetensi APIP, yang mengatur tata cara pembinaan dan peningkatan kompetensi APIP termasuk pemutakhiran standar kompetensi APIP; dan
9. Regulasi atau kebijakan tentang Penguatan GIA Corpu BPKP, yang mengatur peningkatan kapabilitas GIA Corpu dalam menyiapkan APIP yang kompeten dan profesional.

Rincian uraian Matriks Kerangka Regulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Renstra BPKP Tahun 2025-2029 Nomor 3.

3.5 Kerangka Kelembagaan

3.5.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden (auditor presiden). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP dipimpin oleh Kepala. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

- Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- 2) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
 - 3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
 - 4) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
 - 5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
 - 6) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 - 7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
 - 8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - 9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
 - 11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;
 - 12) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP; dan
 - 13) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.

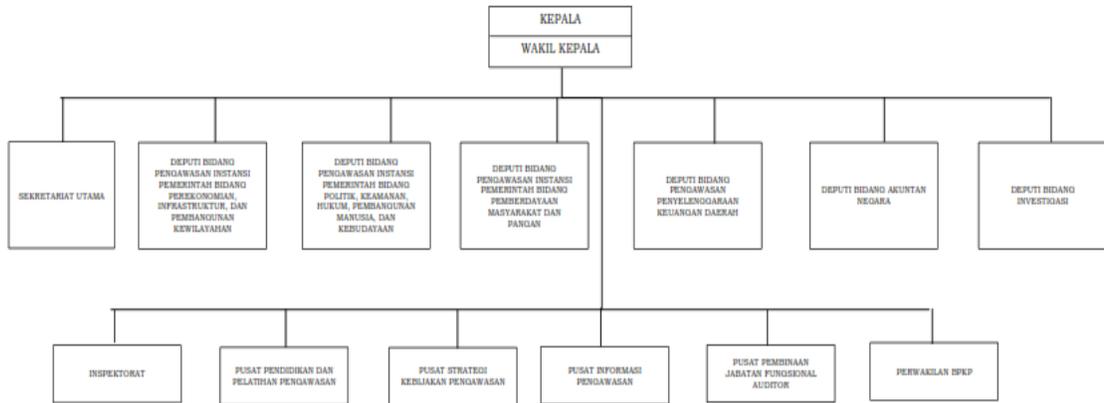
Secara struktur, organisasi BPKP termasuk dalam kategori *functional*, dimana setiap level pimpinan bertanggung jawab atas fungsi, level, dan kinerja yang ditetapkan. Atas kepemilikan dan tanggung jawab kinerja tersebut kemudian diperlukan penetapan melalui tata laksana (*business process*). Tugas dan fungsi organisasi BPKP di atas di-*cascade* ke beberapa kedeputian (Eselon I), yang kemudian operasionalisasinya dilaksanakan sampai tingkat direktorat dan perwakilan (untuk unit teknis pengawasan) dan biro serta pusat (untuk unit pendukung pengawasan/*enabler*). Kedeputian melaksanakan pengawasan lintas sektoral yang

mencakup beberapa bidang yang merupakan kelompok bidang mitra kerja pemerintah pusat (kementerian/lembaga), pengawasan pemerintahan daerah, BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/badan usaha lainnya, dan pengawasan bersifat keinvestigasian.

3.5.2 Struktur Organisasi

BPKP dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala, dengan struktur sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.4. Bagan Struktur Organisasi BPKP



sumber: Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2025

Kepala BPKP didukung oleh 1 (satu) Wakil Kepala dan 6 (enam) Pejabat Eselon I yang memiliki uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPKP;
- 2) Sekretariat Utama sebagai unsur pendukung pimpinan memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan) mempunyai tugas membantu Kepala BPKP di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan) mempunyai tugas membantu Kepala BPKP di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- 5) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan (Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan) mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan

intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;

- 6) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
- 7) Deputi Bidang Akuntan Negara memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- 8) Deputi Bidang Investigasi memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Tiap Deputi terdiri dari paling banyak 5 (lima) direktorat (Eselon II), dan Sekretariat utama terdiri dari 5 (lima) biro (Eselon II). Selain itu, terdapat unit-unit eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2025), yaitu:

- 1) Inspektorat, memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;
- 2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas), memiliki tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan;
- 3) Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (Pustrajakwas), memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pengawasan intern;
- 4) Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas), memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui sistem informasi berbasis elektronik; dan
- 5) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA), memiliki tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional auditor.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Perwakilan BPKP Provinsi dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Terdapat 36 (tiga puluh enam) Kantor Perwakilan BPKP per Tanggal 31 Desember 2024 dengan wilayah kerja meliputi 38 (tiga puluh delapan) Provinsi di Indonesia. Ketentuan mengenai nama perwakilan, lokasi, dan wilayah kerja diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2025.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPKP menetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dan mencerminkan tugas fungsi dan kewenangan BPKP. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap tujuan dan sasaran diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja.

4.1.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai misi BPKP. Pencapaian tujuan tersebut akan meningkatkan kinerja pelayanan institusi pemerintah dan kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan BPKP. Terdapat 2 (dua) tujuan strategis sebagai indikator pencapaian misi BPKP, yaitu (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja 2029
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan	Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara	10.933.571 (juta rupiah)
	Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden oleh BPKP	70
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	
	• K/L	72,82 %
	• Pemerintah Provinsi	57,89 %
	• Pemerintah Kabupaten/Kota	50,20 %

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Terdapat 4 (empat) sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP. Capaian sasaran strategis ini merupakan cerminan dampak dari keberhasilan atau kegagalan capaian *outcome* atas pelaksanaan program. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2025-2029 untuk 4 (empat) sasaran strategis BPKP yaitu:

Tabel 4.2
Tabel Indikator Kinerja Utama BPKP Tahun 2025 – 2029

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	IKU 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Juta Rupiah	10.099.661	10.302.125	10.508.126	10.719.251	10.933.571
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pembangunan Nasional	IKU 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden oleh BPKP	Persentase	N/A	50	58	64	70
	IKU 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L/D/BU	IKU 1: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	47,57	51,46	61,17	66,02	72,82
	IKU 2: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	39,47	44,74	50	55,26	57,89
	IKU 3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20
	IKU 4: Persentase K/L dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Persen (%)	49,00	56,00	65,00	71,00	79,00
	IKU 5: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Persen (%)	39,47	47,37	63,16	76,32	86,84
	IKU 6: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Persen (%)	10,04	21,26	31,50	42,52	53,35
	IKU 7: Persentase BUMN dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	Persen (%)	26,18	33,48	48,50	63,52	85,41

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	IKU 8: Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	Persen (%)	11,17	16,43	21,97	29,86	35,49
	IKU 9: Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	Persen (%)	10,17	19,61	30,60	43,26	55,91
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP	IKU 1: Indeks Kapabilitas Pengawasan BPKP	Indeks Skala 1-5	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65

4.1.3 Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, BPKP memiliki 2 (dua) Program, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengawasan Pembangunan yaitu:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Sasaran Program BPKP

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
Program 01: Program Dukungan Manajemen	4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP	Sasaran Program Sekretariat Utama BPKP							
		1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP	Indeks Kapabilitas Pengawasan BPKP	Indeks Skala 1-5	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks Skala 1-5	7,50	7,54	7,57	7,61	7,65
Program 06: Program Pengawasan Pembangunan		Sasaran Program Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan							
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	Juta Rupiah	1.735.334	1.770.040	1.805.440	1.841.550	1.878.381
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	Persen (%)	N/A	50,00	57,00	57,00	69,00
			Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
	3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU	3. Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	59,09	59,09	63,64	72,73	77,27
			Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen (%)	59,09	68,18	77,27	81,82	86,36
			Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
			Sasaran Program Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan						
	1. Meningkatkan Akutabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Meningkatkan Akutabilitas Keuangan Negara Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	Juta Rupiah	891.992	909.831	928.029	946.589	965.520

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
	2. Meningkatnya Akutabilitas Pembangunan Nasional	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	Persen (%)	N/A	55,00	55,00	66,00	66,00
			Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
	3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU	3. Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	50,00	55,36	64,29	69,64	76,79
			Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen (%)	50,00	57,14	62,50	69,64	78,57
			Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang	Persen (%)	70	70	70	70	70

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
			Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Ditindaklanjuti						
		Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan							
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	Juta Rupiah	44.807	45.703	46.617	47.550	48.500
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	Persen (%)	N/A	47,00	57,00	57,00	68,00
			Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
	3. Meningkatnya Tata Kelola K/L/D/BU	3. Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	23,53	23,53	35,29	35,29	47,06
			Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan	Persen (%)	29,41	35,29	47,06	52,94	64,71

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
			Masyarakat dan Pangan dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3						
			Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	70	70	70	70	70
		Sasaran Program Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah							
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Transfer ke Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	N/A	15,79	26,32	42,11	52,63
			Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Transfer ke Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	N/A	17,14	21,90	28,57	36,00
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Persen (%)	N/A	50,00	60,00	70,00	70,00
			Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
	3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU	3. Meningkatnya Kesadaran K/L/D di Lingkungan Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	66,67	66,67	100	100	100
			Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89
			Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,2
			Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen (%)	50,00	50,00	100	100	100
			Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen (%)	39,47	47,37	63,16	76,32	86,84
			Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen (%)	10,04	21,26	31,50	42,52	53,35
			Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L/D di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	70	70	70	70	70

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
		Sasaran Program Deputi Bidang Akuntan Negara							
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kekayaan Negara dan Daerah yang Dipisahkan	Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Bidang Akuntan Negara	Juta Rupiah	2.475.915	2.525.903	2.576.381	2.628.868	2.681.386
			Persentase BUMN dengan Akuntabilitas Keuangan Baik	Persen (%)	N/A	21,46	31,33	41,20	55,36
			Persentase BUMD dengan Akuntabilitas Keuangan Baik	Persen (%)	N/A	11,64	15,59	21,22	25,16
			Persentase BLU/D dengan Akuntabilitas Keuangan Baik	Persen (%)	N/A	12,76	19,92	28,11	36,31
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Akuntan Negara	Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Akuntan Negara	Persen (%)	N/A	33,00	33,00	66,00	66,00
			Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara	Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
	3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU	3. Meningkatnya Kesadaran K/L/BU di Lingkungan Deputi Akuntan Negara dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi	Persen (%)	66,67	66,67	100	100	100
			Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen (%)	66,67	66,67	100	100	100

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
			Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	70	70	70	70	70
			Persentase BUMN dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	Persen (%)	26,18	33,48	48,50	63,52	85,41
			Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	Persen (%)	11,17	16,43	21,97	29,86	35,49
			Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	Persen (%)	10,17	19,61	30,60	43,26	55,91
			Persentase Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Badan Usaha yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	70	70	70	70	70
		Sasaran Program Deputi Bidang Investigasi							
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Investigasi	Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Investigasi	Juta Rupiah	1.652.505	1.685.554	1.719.265	1.753.651	1.788.724
	2. Meningkatnya Akuntabilitas	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Investigasi	Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Investigasi	Persen (%)	N/A	33,00	33,00	66,00	66,00

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	2025	2026	2027	2028	2029
	Pembangunan Nasional		Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi	Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
	3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola K/L/D/BU	4. Meningkatnya Kesadaran K/L/D/BU di Lingkungan Deputi Investigasi dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	Persentase K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Persen (%)	48,51	51,49	61,39	66,34	73,27
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik			Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89	
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik			Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20	
Persentase BUMN dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik			Persen (%)	3,86	5,58	7,73	9,87	12,88	
Persentase BUMD dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik			Persen (%)	2,54	4,79	7,04	9,39	12,58	
Persentase Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi yang Ditindaklanjuti			Persen (%)	70	70	70	70	70	

Dalam rangka mencapai target dalam Program tersebut, BPKP menguraikannya ke dalam Sasaran Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Pembangunan, terdiri dari 35 Kegiatan dengan 92 Sasaran Kegiatan.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari 6 Kegiatan dengan 6 Sasaran Kegiatan.

Rincian uraian Kegiatan serta Sasaran Kegiatan dan target per tahunnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Renstra BPKP Tahun 2025-2029 Nomor 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam mencapai kinerja BPKP, perlu adanya komitmen menyeluruh dari Pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana, dukungan sarana-prasarana, regulasi serta anggaran yang mencukupi. Tabel Prakiraan Maju anggaran yang diusulkan BPKP sebagai berikut:

Tabel 4.4 Prakiraan Maju Anggaran BPKP Per Program Tahun 2025-2029

No	Program	Nilai Anggaran (Rp dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Program 01: Program Dukungan Manajemen	1.982.573.029	2.966.785.421	2.917.190.993	3.005.540.452	2.984.948.165
2	Program 06: Program Pengawasan Pembangunan	734.643.805	1.072.396.024	1.105.480.567	1.305.708.110	1.551.911.508
TOTAL		2.717.216.834	4.039.181.445	4.022.671.560	4.311.248.562	4.536.859.673

Dalam melaksanakan kegiatannya, kerangka pendanaan BPKP disokong oleh APBN yang terdiri dari Rupiah Murni (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). PNBP BPKP berasal dari Pusdiklatwas BPKP yang menyelenggarakan diklat dengan skema PNBP. PHLN BPKP berasal dari Asian Development Bank (ADB) melalui kegiatan *State Accountability Revitalization - Additional Financing* (STAR-AF). STAR-AF Nomor 3872 INO merupakan kelanjutan dari proyek STAR yang juga didanai oleh ADB dengan *Loan* Nomor 2927 INO. Besaran indikasi nilai pinjaman untuk membiayai kegiatan STAR Lanjutan yaitu sebesar US\$ 90 juta yang akan berakhir pada tahun 2027. Prakiraan maju anggaran BPKP menurut sumber pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Prakiraan Maju Anggaran BPKP Tahun 2025—2029 Per Sumber Pendanaan

No	Sumber Dana	Nilai Anggaran (Rp dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Rupiah Murni (RM)	2.494.035.900	3.524.020.095	3.893.338.820	4.176.337.882	4.394.251.543
2	PNBP	110.615.220	114.481.640	127.682.740	134.910.680	142.608.130
3	PHLN	112.565.714	400.679.710	1.650.000	0	0
TOTAL		2.717.216.834	4.039.181.445	4.022.671.560	4.311.248.562	4.536.859.673

Rincian uraian Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Renstra BPKP Tahun 2025-2029 Nomor 2.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, BPKP dituntut berperan optimal dalam perwujudan Asta Cita ketujuh melalui sinergi pengendalian dan pengawasan program nasional. Sebagai auditor presiden, BPKP berandil dalam pengawalan program pembangunan, pencegahan kebocoran keuangan negara, dan pemberantasan korupsi. Peran strategis yang diterima BPKP merupakan wujud kepercayaan *stakeholder* kepada BPKP dalam mengatasi permasalahan-permasalahan keuangan dan pembangunan nasional.

Kepercayaan tersebut merupakan hasil capaian kinerja BPKP pada periode pengawasan sebelumnya (Tahun 2020-2024). BPKP berkontribusi terhadap keuangan negara sebesar Rp379,30 triliun melalui optimalisasi penerimaan, penghematan, dan penyelamatan keuangan negara. Rekomendasi strategis yang BPKP sampaikan sesuai APP menjadi bahan pertimbangan *stakeholders* dalam meningkatkan akuntabilitas pembangunan nasional. BPKP juga turut serta dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas APIP, SPI Badan Usaha dan BLU/D, manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal.

Oleh karena itu, BPKP wajib menjaga momentum keberhasilan ini pada periode 5 (lima) tahun mendatang. BPKP harus selalu menjaga profesionalisme dan objektivitas penugasan serta memantau AoI bisnis proses pengawasan untuk memastikan kualitas pengawasan tetap terjaga. Kolaborasi dan sinergi masih tetap dilakukan BPKP dengan mitra kerja pengawasan untuk menghindari tumpang tindih praktik pengawasan baik antara sesama APIP, SPI BLU/D, maupun dengan auditor eksternal. Kolaborasi dengan APH juga tetap harus terjaga dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Selain itu, BPKP juga perlu mengoptimalkan keunggulannya seperti fleksibilitas dan jangkauan pengawasan dengan dukungan kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Pada periode mendatang, APP akan tetap menjadi panduan dan kebijakan pengawasan BPKP. APP diperlukan untuk memastikan bahwa dengan sumber daya yang tersedia, pengawasan BPKP tetap berfokus pada capaian program prioritas nasional, isu-isu yang menjadi perhatian Presiden, dan isu yang berkembang di masyarakat. BPKP harus melakukan pengawasan dengan menggunakan perspektif makro dan *system-based* sehingga pengawasan berjalan efisien, tepat waktu, dan memenuhi ekspektasi *stakeholders* dan masyarakat.

Dokumen renstra menjadi acuan perencanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan Tahun 2025-2029 bagi seluruh unit kerja BPKP, termasuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPKP maupun RKA BPKP. Untuk memastikan keberhasilan atas pelaksanaan Renstra, diperlukan komitmen pimpinan yang kuat, peran aktif dari seluruh pegawai, kerangka regulasi yang cukup, *enablers* yang memadai, dan kepercayaan *stakeholders*. Selain itu, sinergi kuat baik di internal maupun eksternal juga sangat berpengaruh untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Lampiran Renstra BPKP Tahun 2025-2029 Nomor 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN										2.717.216.834	4.039.181.445	4.022.671.560	4.309.248.562	4.536.859.673	
	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah									61.027.563	73.233.077	87.879.690	105.455.624	126.546.747	BPKP
	IKU 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah		Juta Rupiah	10.099.661	10.302.125	10.508.126	10.719.251	10.933.571							
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional									302.388.674	461.134.926	545.957.004	647.003.030	767.443.720	BPKP
	IKU 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden oleh BPKP		Persen (%)	TBD	50	58	64	70							
	IKU 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/D/BU									371.227.568	538.028.021	471.643.873	553.249.456	657.921.041	BPKP
	IKU 1: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	47,57	51,46	61,17	66,02	72,82							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKU 2: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89						
	IKU 3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20						
	IKU 4: Persentase K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	49,00	56,00	65,00	71,00	79,00						
	IKU 5: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	39,47	47,37	63,16	76,32	86,84						
	IKU 6: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	10,04	21,26	31,50	42,52	53,35						
	IKU 7: Persentase BUMN dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	26,18	33,48	48,50	63,52	85,41						
	IKU 8: Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	11,17	16,43	21,97	29,86	35,49						
	IKU 9: Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	10,17	19,61	30,60	43,26	55,91						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP									1.982.573.029	2.966.785.421	2.917.190.993	3.005.540.452	2.984.948.165	BPKP
	IKU 1: Indeks Kapabilitas Pengawasan BPKP		Indeks Skala 1-5	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65							
PROGRAM: PENGAWASAN PEMBANGUNAN															
	Sasaran Program 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan									5.335.290	6.402.347	7.682.815	9.219.377	11.063.252	Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan
	IKP 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan		Juta Rupiah	1.735.334	1.770.040	1.805.440	1.841.550	1.878.381							
	Sasaran Program 2: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan									27.120.697	33.952.252	40.519.805	48.378.582	57.784.595	Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan
	IKP 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan		Persen (%)	N/A	50,00	57,00	57,00	69,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Pembangunan Kewilayahan													
	IKP 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Program 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									4.116.722	4.940.066	5.928.080	8.892.121	9.514.570
	IKP 1: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	59,09	59,09	63,64	72,73	77,27						
	IKP 2: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	59,09	68,18	77,27	81,82	86,36						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	IKP 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
	Sasaran Program 4: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan									3.153.749	3.784.500	4.541.400	5.449.679	6.539.615	Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	IKP 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Juta Rupiah	891.992	909.831	928.029	946.589	965.520							
	Sasaran Program 5: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan									26.051.762	32.669.530	38.980.540	46.531.463	55.568.051	Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	IKP 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Politik, Keamanan, Hukum,		Persen (%)	N/A	55,00	55,00	66,00	66,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan													
	IKP 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Program 6: Meningkatkan Keadaran K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan								4.763.416	5.716.100	6.859.320	10.288.981	11.009.210	Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	IKP 1: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	50,00	55,36	64,29	69,64	76,79						
	IKP 2: Persentase K/L/ di Lingkungan Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	50,00	57,14	62,50	69,64	78,57						
	IKP 3: Persentase Rekomendasi Penguatan		Persen (%)	70	70	70	70	70						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Ditindaklanjuti													
	Sasaran Program 7: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan								2.206.891	2.648.269	3.177.923	3.813.508	4.576.209	Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan
	IKP 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan		Juta Rupiah	44.807	45.703	46.617	47.550	48.500						
	Sasaran Program 8: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan								8.454.856	25.374.729	30.226.779	36.026.949	42.962.636	Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan
	IKP 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan		Persen (%)	N/A	47,00	57,00	57,00	68,00						
	IKP 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Program 9: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									2.210.214	2.652.256	3.315.321	4.972.983	5.321.092	Deputi Bidang PIP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan
	IKP 1: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	23,53	23,53	35,29	35,29	47,06							
	IKP 2: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	29,41	35,29	47,06	52,94	64,71							
	IKP 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70							
	Sasaran Program 10: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah									7.408.673	8.890.408	10.668.490	12.802.188	15.362.626	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
	IKP 1: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Pengelolaan		Persen (%)	N/A	15,79	26,32	42,11	52,63							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Kuangan dan Pemanfaatan Transfer ke Daerah yang Akuntabel													
	IKP 2: Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Transfer ke Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	17,14	21,90	28,57	36,00						
	Sasaran Program 11: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah								17.705.018	22.653.438	26.961.230	32.108.290	38.260.245	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
	IKP 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah		Persen (%)	N/A	50,00	60,00	70,00	70,00						
	IKP 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Program 12: Meningkatnya Kesadaran K/L/D di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern								2.279.867	4.052.025	5.749.199	8.623.799	9.227.464	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKP 1: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	66,67	66,67	100	100	100						
	IKP 2: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89						
	IKP 3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20						
	IKP 4: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00						
	IKP 5: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	39,47	47,37	63,16	76,32	86,84						
	IKP 6: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	10,04	21,26	31,50	42,52	53,35						
	IKP 7: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern		Persen (%)	70	70	70	70	70						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	K/L/D di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang Ditindaklanjuti														
	Sasaran Program 13: Meningkatnya Akuntabilitas Kekayaan Negara dan Daerah yang Dipisahkan									4.122.189	4.946.627	5.935.952	7.123.142	8.547.770	Deputi Bidang Akuntan Negara
	IKP 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Bidang Akuntan Negara		Juta Rupiah	2.474.415	2.523.903	2.576.381	2.625.868	2.678.386							
	IKP 2: Persentase BUMN dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	21,46	31,33	41,20	55,36							
	IKP3: Persentase BUMD dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	11,64	15,59	21,22	25,16							
	IKP 4: Persentase BLU/D dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	12,76	19,92	28,11	36,31							
	Sasaran Program 14: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Akuntan Negara									20.361.806	25.841.581	30.786.999	36.699.211	43.769.349	Deputi Bidang Akuntan Negara
	IKP 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas		Persen (%)	N/A	33,00	33,00	66,00	66,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Presiden Bidang Akuntan Negara														
	IKP 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Program 15: Meningkatkan Kesadaran K/L/BU di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									3.280.686	8.928.504	12.053.480	18.080.220	19.345.836	Deputi Bidang Akuntan Negara
	IKP 1: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00							
	IKP 2: Persentase K/L di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00							
	IKP 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Deputi Bidang Akuntan Negara yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70							
	IKP 4: Persentase BUMN dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	26,18	33,48	48,50	63,52	85,41							
	IKP 5: Persentase BUMD dengan		Persen (%)	11,17	16,43	21,97	29,86	35,49							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik														
	IKP 6: Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	10,17	19,61	30,60	43,26	55,91							
	IKP 7: Persentase Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Badan Usaha yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70							
	Sasaran Program 16: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Investigasi									2.236.405	2.683.686	3.220.423	3.864.508	4.637.409	Deputi Bidang Investigasi
	IKP 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Investigasi		Juta Rupiah	1.652.505	1.685.554	1.719.265	1.753.651	1.788.724							
	Sasaran Program 17: Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Investigasi									24.962.906	31.362.905	37.412.592	44.649.926	53.310.207	Deputi Bidang Investigasi
	IKP 1: Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden Bidang Investigasi		Persen (%)	N/A	33,00	33,00	66,00	66,00							
	IKP 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Program 18: Meningkatnya									4.360.375	6.145.944	8.297.026	12.445.541	13.316.728	Deputi Bidang Investigasi

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Kesadaran K/L/D/BU di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern													
	IKP 1: Persentase K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	48,51	51,49	61,39	66,34	73,27						
	IKP 2: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89						
	IKP 3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20						
	IKP 4: Persentase BUMN dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	3,86	5,58	7,73	9,87	12,88						
	IKP 5: Persentase BUMD dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	2,54	4,79	7,04	9,39	12,58						
	IKP 6: Persentase Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
	Sasaran Program 19: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah di Lingkungan Perwakilan BPKP								36.564.366	43.877.240	52.652.687	63.183.222	75.819.866	Perwakilan BPKP

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKP 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah di Lingkungan Perwakilan BPKP		Juta Rupiah	3.299.108	3.365.094	3.432.394	3.501.043	3.571.060						
	Sasaran Program 20: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional di Lingkungan Perwakilan BPKP								177.731.629	289.280.491	341.069.059	402.608.609	475.788.637	Perwakilan BPKP
	IKP 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Perwakilan BPKP		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	IKP 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Program 21: Meningkatkan Kesadaran Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Lingkungan Perwakilan BPKP dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern								36.764.464	86.396.491	103.675.787	122.309.280	141.194.373	Perwakilan BPKP
	IKP 1: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89						
	IKP 2: Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKP 3: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	39,47	47,37	63,16	76,32	86,84						
	IKP 4: Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	10,04	21,26	31,50	42,72	53,35						
	IKP 5: Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan Pengendalian Intern yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
	IKP 6: Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	11,17	16,43	21,97	29,86	35,49						
	IKP 7: Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	9,86	19,09	29,90	42,42	54,93						
	IKP 8: Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Badan Usaha	27	51	75	100	134						
	IKP 9: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Risiko dan Efektivitas Pengendalian Korupsi Badan Usaha yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
	Sasaran Program 22: Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Pengawasan								313.451.824	419.196.635	325.765.660	367.636.531	448.991.768	
	IKP 1: Skor Kapabilitas Inspektorat		Skor	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKP 2: Indeks SPBE		Indeks Skala 5	4,33	4,34	4,36	4,37	4,38						
	IKP 3: Pemanfaatan Hasil Pembinaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		Nilai	65,00	67,00	70,00	75,00	80,00						
	IKP 4: Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Pelatihan		Nilai	80,00	82,00	83,00	85,00	87,00						
	IKP 5: Tingkat Kualitas Produk Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	IKP 6: Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengawasan BPKP dan APIP Lainnya		Dokumen	1	1	1	1	1						
	KEGIATAN: PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BPKP													
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat								3.093.087	3.711.703	3.926.877	4.712.253	5.654.704	Inspektorat
	IKK 1: Skor Kapabilitas Inspektorat		Skor	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
	IKK 2: Indeks Kepuasan Hasil Pengawasan Inspektorat		Indeks	70	72	74	77	80						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan															
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Pusat Informasi Pengawasan									22.315.915	3.836.194	4.603.433	5.524.119	6.628.944	Pusat Informasi Pengawasan
	IKK 1: Indeks SPBE		Indeks Skala 1-5	4,33	4,34	4,36	4,37	4,38							
	IKK 2: Indeks Kepuasan Layanan Pusat Informasi Pengawasan		Indeks Skala 1-100	83,34	84	85,3	86,5	87,8							
Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor															
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor									4.577.500	5.492.999	6.591.598	7.909.920	9.491.904	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
	IKK 1: Pemanfaatan Hasil Pembinaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		Nilai	65,00	67,00	70,00	75,00	80,00							
	IKK 2: Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA		Indeks Skala 1-100	88,53	88,56	88,59	88,62	88,65							
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan															
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan									170.452.255	256.696.206	165.064.839	178.953.439	223.309.952	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
	IKK 1: Persentase Sumber Daya Manusia		Persen (%)	80	82	83	85	87							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Pelatihan													
	IKK 2: Persentase hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Minimal "baik"		Persen (%)	92	93	94	95	96						
Pengembangan Strategi Kebijakan Pengawasan														
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Strategi dan Kebijakan Pengawasan								7.804.166	8.807.102	10.010.626	11.034.854	12.503.928	Pusat Strategi dan Kebijakan Pengawasan
	IKK 1: Tingkat Kualitas Produk Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Produk dan Layanan Pustrajakwas		Persen (%)	67	69	70	71	72						
Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah di Lingkungan Perwakilan BPKP								36.564.366	43.877.240	52.652.687	63.183.222	75.819.866	Perwakilan BPKP
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah di Lingkungan Perwakilan BPKP		Juta Rupiah	3.299.108	3.365.094	3.432.394	3.501.043	3.571.060						
	IKK 2: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Pengelolaan		Persen (%)	N/A	15,79	26,32	42,11	52,63						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Keuangan yang Akuntabel														
	IKK 3: Persentase Pemerintah Kab/Kota yang diawasi dengan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	17,14	21,9	28,57	36							
	IKK 4: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Pengelolaan Keuangan Transfer ke Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	15,79	26,32	42,11	52,63							
	IKK 5: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Keuangan Transfer ke Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	17,14	21,9	28,57	36							
	IKK 6: Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	19,05	23,81	28,57	35,71							
	IKK 7: Persentase BUMD dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	11,52	15,39	20,96	24,83							
	IKK 8: Persentase BLU/D dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	12,62	19,71	27,84	35,97							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional di Lingkungan Perwakilan BPKP									177.731.629	289.280.491	341.069.059	402.608.609	475.788.637	Perwakilan BPKP
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Perwakilan BPKP		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Lingkungan Perwakilan BPKP dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern								36.764.464	86.396.491	103.675.787	122.309.280	141.194.373	Perwakilan BPKP
	IKK 1: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89						
	IKK 2: Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20						
	IKK 3: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	39,47	47,37	63,16	76,32	86,84						
	IKK 4: Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	10,04	21,26	31,50	42,72	53,35						
	IKK 5: Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan Pengendalian Intern yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
	IKK 6: Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	11,17	16,43	21,97	29,86	35,49						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 7: Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	9,86	19,09	29,90	42,42	54,93						
	IKK 8: Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Badan Usaha	27	51	75	100	134						
	IKK 9: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Risiko dan Efektivitas Pengendalian Korupsi Badan Usaha yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan								2.674.601	3.209.521	3.851.425	4.621.710	5.546.052	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan		Juta Rupiah	94.859	96.756	98.691	100.665	102.678						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi dan Keuangan									4.070.430	4.884.516	5.861.419	7.033.703	8.440.443	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									789.907	947.888	1.137.466	1.706.199	1.825.633	Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang		Persen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Ekonomi dan Keuangan dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3														
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70							
Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata dan Pembangunan Kewilayahan															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitasnya Keuangan Negara Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan									552.946	663.535	796.242	955.490	1.146.588	Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata dan Pembangunan Kewilayahan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan		Juta Rupiah	323.724	330.198	336.802	343.538	350.409							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan									6.041.045	7.249.254	8.699.104	10.438.925	12.526.710	Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata dan Pembangunan Kewilayahan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern								1.032.149	1.238.579	1.486.295	2.229.443	2.385.504	Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00						
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan dengan		Persen (%)	25,00	50,00	75,00	75,00	100,00						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Kapabilitas APIP ≥ Level 3														
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70							
Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Infrastruktur dan Perhubungan									363.127	435.752	522.902	627.482	752.978	Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Infrastruktur, dan Perhubungan		Juta Rupiah	1.225.075	1.249.577	1.274.568	1.300.059	1.326.061							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Infrastruktur dan Perhubungan									5.721.916	6.866.299	8.239.558	9.887.470	11.864.964	Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan														
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									772.199	926.639	1.111.967	1.667.951	1.784.708	Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00							
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00							
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan		Persen (%)	70	70	70	70	70							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang Ditindaklanjuti														
Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan									801.139	961.367	1.153.640	1.384.368	1.661.242	Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan		Juta Rupiah	79.020	80.600	82.212	83.857	85.534							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan									5.293.437	6.352.124	7.622.549	9.147.059	10.976.471	Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan														
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									733.806	880.567	1.056.680	1.585.020	1.695.971	Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00							
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00							
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan		Persen (%)	70	70	70	70	70							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Ketenagakerjaan yang Ditindaklanjuti														
Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan									943.477	1.132.172	1.358.606	1.630.327	1.956.392	Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan		Juta Rupiah	12.656	12.909	13.167	13.431	13.699							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan									5.993.869	8.600.059	10.097.175	11.871.425	13.976.007	Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan									414.143	496.972	596.366	715.639	858.767	Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan		Juta Rupiah	165.954	169.273	172.659	176.112	179.634							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan									5.701.967	8.249.777	9.676.837	11.367.020	13.370.721	Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam									815.863	979.036	1.174.843	1.762.265	1.885.624	Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Melakukan Penguatan Pengendalian Intern													
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	53,85	76,92	92,31	92,31	92,31						
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	61,54	84,62	100,00	100,00	100,00						
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan yang ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Politik dan Penegakan Hukum								879.173	1.055.008	1.266.010	1.519.212	1.823.054	Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara		Juta Rupiah	5.671	5.784	5.900	6.018	6.138						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Bidang Politik dan Penegakan Hukum														
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Politik dan Penegakan Hukum									5.448.661	6.538.393	7.846.072	9.415.286	11.298.342	Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									1.228.800	1.474.560	1.769.472	2.654.208	2.840.003	Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	26,32	26,32	36,84	47,37	57,89							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	26,32	26,32	31,58	47,37	57,89						
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana								628.543	754.252	905.102	1.086.122	1.303.346	Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana		Juta Rupiah	466.032	475.353	484.860	494.557	504.448						
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan,								6.529.109	7.834.930	9.401.916	11.282.300	13.538.760	Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana													Keluarga, dan Bencana	
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									770.919	925.103	1.110.124	1.665.186	1.781.749	Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	66,67	66,67	83,33	83,33	83,33							
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang		Persen (%)	83,33	83,33	83,33	83,33	100,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3													
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan									579.921	695.905	835.086	1.002.103	1.202.524
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Juta Rupiah	248.972	253.951	259.030	264.211	269.495						
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan									4.765.304	5.718.365	6.862.038	8.234.445	9.881.334
														Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern									832.476	998.971	1.198.765	1.798.148	1.924.018	Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	37,50	37,50	37,50	50,00	62,50							
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	37,50	37,50	37,50	50,00	62,50							
	IKK 3: Persentase Rekomendasi		Persen (%)	70	70	70	70	70							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Ditindaklanjuti														
Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi									651.969	782.363	938.836	1.126.603	1.351.924	Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi		Juta Rupiah	5.363	5.470	5.580	5.691	5.805							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi									3.606.721	4.328.065	5.193.677	6.232.412	7.478.894	Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									1.115.358	1.338.430	1.606.116	2.409.174	2.577.816
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00						
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70						
Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran								625.186	750.223	900.268	1.080.322	1.296.386	Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran		Juta Rupiah	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412						
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas								1.927.205	5.890.435	7.068.522	8.482.226	10.178.672	Direktorat Pengawasan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran													Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran	
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									566.726	680.071	850.089	1.275.134	1.364.393	Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan		Persen (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Karakteristik Berbasis Terdefinisi													
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00						
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat								625.186	750.223	900.268	1.080.322	1.296.386	Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		Juta Rupiah	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat									1.439.049	5.558.212	6.669.854	8.003.825	9.604.590	Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									514.627	617.552	771.940	1.157.910	1.238.964	Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00						
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
Pengawasan Bidang Pangan														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Pangan								261.868	314.242	377.090	452.508	543.010	Direktorat Pengawasan Bidang Pangan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Pangan		Juta Rupiah	23.297	23.763	24.238	24.723	25.217						
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Pangan								2.080.080	5.674.631	6.809.557	8.171.468	9.805.761	Direktorat Pengawasan Bidang Pangan
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pangan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pangan														
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pangan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									620.022	744.026	930.033	1.395.050	1.492.704	Direktorat Pengawasan Bidang Pangan
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pangan dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00							
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pangan dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	40,00	40,00	40,00	40,00	60,00							
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Pangan yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan									694.651	833.581	1.000.297	1.200.356	1.440.427	Direktorat Pengawasan Bidang

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Negara Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup													Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Juta Rupiah	11.510	11.740	11.975	12.215	12.459							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup									3.008.522	8.251.451	9.678.846	11.369.430	13.373.613	Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									508.839	610.607	763.259	1.144.889	1.225.031	Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	25,00	25,00	75,00	75,00	75,00						
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00						
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah								2.903.503	3.484.204	4.181.045	5.017.254	6.020.705	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
	IKK 1: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	15,79	26,32	42,11	52,63						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET						ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 2: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	17,14	21,90	28,57	36,00						
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah								3.462.839	4.155.407	4.986.488	5.983.785	7.180.541	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern								249.489	299.387	404.172	606.258	648.696	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
	IKK 1: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang Ditindaklanjuti														
Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah									2.776.538	3.331.846	3.998.215	4.797.858	5.757.430	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
	IKK 1: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Pengelolaan Keuangan Transfer ke Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	15,79	26,32	42,11	52,63							
	IKK 2: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Keuangan Transfer ke Daerah yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	17,14	21,90	28,57	36,00							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah									4.405.133	5.286.160	6.343.393	7.612.072	9.134.487	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah														
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern									366.151	439.381	593.164	889.746	952.028	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah
	IKK 1: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah yang ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan									1.728.632	2.074.358	2.489.230	2.987.076	3.584.491	Direktorat Pengawasan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa													Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	
	IKK 1: Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		Persen (%)	N/A	19,05	23,81	28,57	35,71							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa									4.189.836	5.027.803	6.033.363	7.240.035	8.688.043	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern									417.598	501.118	676.509	1.014.764	1.085.797	Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
	IKK 1: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah															
	Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Tata Kelola Pemerintah Daerah									5.647.210	8.184.068	9.597.986	11.272.398	13.257.174	Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
	IKK 1: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah														
	IKK 2:Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kesadaran K/L/D di Lingkungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern									1.246.629	2.812.139	4.075.354	6.113.031	6.540.943	Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00							
	IKK 2: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	39,47	44,74	50,00	55,26	57,89							
	IKK 3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20							
	IKK 4: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola		Persen (%)	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Pemerintah Daerah dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3														
	IKK 5: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	39,47	47,37	63,16	76,32	86,84							
	IKK 6: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3		Persen (%)	10,04	21,26	31,50	42,52	53,35							
	IKK 7: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern K/L/D di Lingkungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kekayaan Negara yang Dipisahkan Bidang Agrobisnis dan Infrastruktur									459.303	551.164	661.397	793.676	952.411	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur
	IKK 1: Persentase BUMN Agrobisnis dan Infrastruktur dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	9,76	17,07	25,61	52,44							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas									3.545.103	4.254.123	5.104.947	6.125.936	7.351.123	Direktorat Pengawasan Badan Usaha

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Pembangunan Nasional pada Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur													Agrobisnis dan Infrastruktur	
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran Badan Usaha di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									447.140	1.630.947	2.201.778	3.302.667	3.533.854	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur
	IKK 1: Persentase BUMN di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	6,10	14,63	26,83	40,24	80,49							
	IKK 2: Persentase Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Badan Usaha di		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur yang Ditindaklanjuti														
Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kekayaan Negara yang Dipisahkan Bidang Konektivitas dan Pariwisata									966.264	1.159.517	1.391.420	1.669.704	2.003.645	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata
	IKK 1: Persentase BUMN Konektivitas dan Pariwisata dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	26,42	32,08	39,62	47,17							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional pada Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata									3.565.281	4.278.337	5.134.004	6.160.804	7.392.965	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Usaha Konektivitas dan Pariwisata														
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran K/L/BU di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata alam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									964.311	1.397.253	1.886.292	2.829.438	3.027.499	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi		Persen (%)	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00							
	IKK 2: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		Persen (%)	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00							
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengendalian Intern KL di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
	IKK 4: Persentase BUMN di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan		Persen (%)	30,19	41,51	49,06	60,38	73,58							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Pariwisata dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik													
	IKK 5: Persentase Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Badan Usaha di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
Pegawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitasnya Kekayaan Negara yang Dipisahkan Bidang Jasa Keuangan dan Manufaktur								772.827	927.392	1.112.870	1.335.444	1.602.533	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur		Juta Rupiah	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000						
	IKK 2: Persentase BUMN Jasa Keuangan dan Manufaktur dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	27,12	42,37	54,24	61,02						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional pada Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur									5.817.817	8.388.796	9.843.659	11.567.205	13.610.943	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran Badan Usaha di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									712.891	1.929.600	2.604.960	3.907.440	4.180.961	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
	IKK 1: Persentase BUMN di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur dengan Maturitas Manajemen		Persen (%)	37,29	42,37	66,10	83,05	93,22							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik														
	IKK 2: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Risiko BUMN di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70	70	70	70	70							
Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kekayaan Negara yang Dipisahkan Bidang Energi dan Pertambangan									516.717	620.060	744.072	892.886	1.071.463	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Energi dan Pertambangan		Juta Rupiah	2.474.415	2.523.903	2.574.381	2.625.868	2.678.386							
	IKK 2: Persentase BUMN Energi dan Pertambangan yang Berkontribusi Terhadap Fiskal Pemerintah		Persen (%)	N/A	30,77	43,59	56,41	64,10							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Badan Usaha									3.747.724	4.497.268	5.396.721	6.476.065	7.771.278	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Energi dan Pertambangan													
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran Badan Usaha di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern								584.977	1.428.843	1.928.938	2.893.407	3.095.945	Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
	IKK 1: Persentase BUMN di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	46,15	48,72	66,67	87,18	100,00						
	IKK 2: Persentase Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Badan Usaha di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Usaha Energi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti														
Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kekayaan Daerah yang Dipisahkan									1.407.078	1.688.494	2.026.193	2.431.432	2.917.718	Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa
	IKK 1: Persentase BUMD dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	11,64	15,59	21,22	25,16							
	IKK 2: Persentase BLU/D dengan Akuntabilitas Keuangan Baik		Persen (%)	N/A	12,76	19,92	28,11	36,31							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional pada Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Desa									3.685.881	4.423.057	5.307.668	6.369.201	7.643.040	Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kesadaran Badan Usaha di Lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern									571.367	2.541.861	3.431.512	5.147.268	5.507.577	Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa
	IKK 1: Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	11,17	16,43	21,97	29,86	35,49							
	IKK 2: Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik		Persen (%)	10,17	19,61	30,60	43,26	55,91							
	IKK 3: Persentase Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Risiko Badan Usaha yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
Pengawasan Investigasi I															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Direktorat Investigasi I									491.371	589.645	707.574	849.089	1.018.907	Direktorat Investigasi I
	IKK 1: Nilai Penghematan dan		Juta Rupiah	742.931	757.789	772.945	788.404	804.172							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Penyelamatan Keuangan Negara Direktorat Investigasi I														
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Direktorat Investigasi I									5.260.614	6.312.737	7.575.285	9.090.342	10.908.410	Direktorat Investigasi I
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Investigasi I		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Investigasi I		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L/D/BU di Lingkungan Direktorat Investigasi I dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern									633.765	1.105.242	1.492.077	2.238.116	2.394.784	Direktorat Investigasi I
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Investigasi I dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	57,14	57,14	57,14	61,90	76,19							
	IKK 2: Persentase Pemerintah Provinsi di Lingkungan Direktorat Investigasi I dengan Efektivitas		Persen (%)	50,00	58,33	58,33	75,00	75,00							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Pengendalian Korupsi Baik													
	IKK 3: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Investigasi I dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	10,12	19,05	31,55	43,45	59,52						
	IKK 4: Persentase BUMN di Lingkungan Direktorat Investigasi I dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	4,13	5,79	7,44	9,92	12,40						
	IKK 5: Persentase BUMD di Lingkungan Direktorat Investigasi I dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	2,87	5,26	7,18	9,33	12,20						
	IKK 6: Persentase Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi K/L/D/BU di Lingkungan Direktorat Investigasi I yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
Pengawasan Investigasi II														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitasnya Keuangan Negara Bidang Direktorat Investigasi II								573.656	688.387	826.064	991.277	1.189.532	Direktorat Investigasi II
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Investigasi II		Juta Rupiah	459.241	468.425	477.794	487.350	497.097						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Direktorat Investigasi II									5.013.114	6.015.737	7.218.885	8.662.662	10.395.194	Direktorat Investigasi II
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Investigasi II		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Investigasi II		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L/D/BU di Lingkungan Direktorat Investigasi II dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern									753.123	1.105.242	1.492.077	2.238.116	2.394.784	Direktorat Investigasi II
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Investigasi II dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	46,88	51,56	60,94	65,63	71,88							
	IKK 2: Persentase Pemerintah Provinsi di Lingkungan Direktorat Investigasi II dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	45,45	45,45	63,64	63,64	63,64							
	IKK 3: Persentase Pemerintah		Persen (%)	8,84	14,29	20,41	27,21	34,01							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Investigasi II dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik													
	IKK 4: Persentase BUMN di Lingkungan Direktorat Investigasi II dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	3,92	5,88	7,84	9,80	13,73						
	IKK 5: Persentase BUMD di Lingkungan Direktorat Investigasi II dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	2,36	5,12	8,27	11,02	14,96						
	IKK 6: Persentase Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi K/L/D/BU di Lingkungan Direktorat Investigasi II yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00						
Pengawasan Investigasi III														
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Direktorat Investigasi III								659.951	791.941	950.329	1.140.395	1.368.474	Direktorat Investigasi III
	IKK 1: Nilai Penghematan dan Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Investigasi III		Juta Rupiah	450.333	459.340	468.526	477.897	487.455						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Direktorat Investigasi III									4.563.114	5.475.737	6.570.885	7.885.062	9.462.074	Direktorat Investigasi III
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Investigasi III		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Investigasi III		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran K/L/D/BU di Lingkungan Direktorat Investigasi III dalam Melakukan Penguatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern									811.148	1.428.096	1.927.930	2.891.895	3.094.328	Direktorat Investigasi III
	IKK 1: Persentase K/L di Lingkungan Direktorat Investigasi III dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	43,75	43,75	68,75	75,00	75,00							
	IKK 2: Persentase Pemerintah Provinsi di Lingkungan Direktorat Investigasi III dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	26,67	33,33	33,33	33,33	40,00							
	IKK 3: Persentase Pemerintah		Persen (%)	10,36	19,17	29,53	42,49	54,40							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Investigasi III dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik														
	IKK 4: Persentase BUMN di Lingkungan Direktorat Investigasi III dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	3,28	4,92	8,20	9,84	13,11							
	IKK 5: Persentase BUMD di Lingkungan Direktorat Investigasi III dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		Persen (%)	2,29	4,07	6,11	8,40	11,45							
	IKK 6: Persentase Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi K/L/D/BU di Lingkungan Direktorat Investigasi III yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							
Pengawasan Investigasi IV															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Direktorat Investigasi IV									353.669	424.403	509.284	611.141	733.369	Direktorat Investigasi IV
	IKK 1: Persentase Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Dimanfaatkan		Persen (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan									6.116.322	8.747.003	10.273.508	12.083.025	14.229.927	Direktorat Investigasi IV

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Investigasi IV														
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Investigasi IV		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan							
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Investigasi IV		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal							
	Sasaran Kegiatan 3: Penguatan Kebijakan Pengawasan Pengendalian Kecurangan pada K/L/D/BU									656.166	1.253.682	1.692.471	2.538.707	2.716.416	Direktorat Investigasi IV
	IKK 1: Jumlah Kebijakan Pengendalian Kecurangan yang Diterbitkan		Dokumen	1	1	1	1	1							
Pengawasan Forensik Digital dan Analitika Data															
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Direktorat Forensik dan Analitika Data									157.758	189.310	227.172	272.606	327.127	Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data
	IKK 1: Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Dimanfaatkan		Persen (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00							
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan									4.009.742	4.811.691	5.774.029	6.928.835	8.314.602	Direktorat Forensik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data													Digital dan Analitika Data
	IKK 1: Tingkat Rata-rata Kualitas Hasil Pengawasan di Lingkungan Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	IKK 2: Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data		Predikat	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Kompetensi APIP dalam Upaya Pengendalian Kecurangan								1.506.173	1.253.682	1.692.471	2.538.707	2.716.416	Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data
	IKK 1: Persentase APIP yang Ditingkatkan Kompetensinya dalam Pelaksanaan Pengawasan Investigatif		Persen (%)	65,00	67,00	70,00	73,00	75,00						
Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pengawasan Intern Nasional dan Pengembangan Metodologi Pengawasan														
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Kebijakan								105.208.901	140.652.431	135.568.287	159.501.946	191.402.336	Biro Manajemen Kinerja, Organisasi,

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Sumber Daya Manusia									51.498.618	76.465.821	82.966.483	89.541.426	96.194.368	Biro Sumber Daya Manusia
	IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Sumber Daya Manusia		Indeks Skala 1-10	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5							
Pembinaan dan Koordinasi Layanan Keuangan															
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Keuangan									1.313.511.117	1.945.801.064	2.024.422.207	2.106.227.651	2.191.346.739	Biro Keuangan
	IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Keuangan		Indeks Skala 1-10	8,62	8,64	8,67	8,69	8,72							
Pembinaan dan Koordinasi Layanan Manajemen Kinerja Organisasi, dan Tata Kelola															
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola									3.685.598	4.491.717	4.716.303	4.952.119	5.199.725	Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
	IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola		Indeks Skala 1-10	8,49	8,5	8,52	8,53	8,55							
Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sarana Prasarana dan Layanan Internal															
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas									102.200.091	123.718.404	98.508.655	100.500.628	120.132.024	Biro Umum dan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Layanan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa													Pengadaan Barang/Jasa
	IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa		Indeks Skala 1-10	8,38	8,4	8,42	8,44	8,46						
Pelaksanaan Dukungan Manajemen														
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Layanan Unit Kerja								508.724.086	812.719.191	702.808.659	698.361.507	567.920.331	
	IKK 1: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)		Persen (%)	70	70	70	70	70						

Lampiran Renstra BPKP Tahun 2025-2029 Nomor 2

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas : Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional
 Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

No	Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta)					Alokasi Non-APBN (dalam juta)					Total (dalam juta)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase K/L dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	47,57	51,46	61,17	66,02	72,82	21.011	32.435	42.202	63.304	67.735						21.011	32.435	42.202	63.304	67.735
2	Persentase Provinsi dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	39,47	44,74	50	55,26	57,89	3.676	8.640	10.368	12.231	14.119						3.676	8.640	10.368	12.231	14.119
3	Persentase Kab/Kota dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	9,84	17,72	27,56	38,39	50,20	33.088	77.756	93.308	110.078	127.075						33.088	77.756	93.308	110.078	127.075
4	Tingkat pemanfaatan hasil pengawasan intern dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	24.838	74.049	81.454	89.559	98.559						24.838	74.049	81.454	89.599	98.559
	TOTAL						82.614	192.880	227.332	275.212	307.488	0	0	0	0	0	82.614	192.880	227.332	275.212	307.488

Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Regulasi atau kebijakan tentang Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan BPKP, yang mengatur pola hubungan dengan APIP dan pemeriksa eksternal pemerintah	Untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih kegiatan pengawasan internal oleh APIP dan pemeriksaan oleh Auditor Eksternal, serta mewujudkan sinergi dan kolaborasi pengawasan	Pusbin JFA	Inspektorat K/L/D, Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Birokumasi	2028
2	Regulasi atau kebijakan tentang Agilitas dan konvergensi pengawasan BPKP, yang mengatur fleksibilitas topik pengawasan prioritas dan pola hubungan antar direktorat dalam melaksanakan pengawasan	Untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih kegiatan pengawasan dalam internal BPKP dan mewujudkan sinergi dan kolaborasi di internal BPKP	Biro MKOT	Deputi Teknis BPKP dan Birokumasi	2028
3	Regulasi atau kebijakan tentang pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, yang mengatur tata cara tindak lanjut dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP	Untuk memastikan hasil pengawasan BPKP ditindak lanjuti dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan akuntabilitas keuangan, pembangunan, dan kualitas tata kelola mitra	Biro MKOT	Inspektorat, Deputi Teknis BPKP, dan Birokumasi	2027
4	Regulasi atau kebijakan tentang Pemutakhiran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengukuran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengatur strategi pembinaan dan tata cara evaluasi maturitas SPIP	Untuk mengakomodasi pemutakhiran metodologi pengukuran Maturitas SPIP Terintegrasi	Putrajakwas	Deputi Bidang PPKD dan Birokumasi	2028
5	Regulasi atau kebijakan tentang Pemutakhiran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengukuran Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang mengatur strategi pembinaan dan tata cara evaluasi Kapabilitas APIP	Untuk mengakomodasi pemutakhiran metodologi pengukuran Kapabilitas APIP	Pusbin JFA	Deputi Bidang PPKD dan Birokumasi	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
6	Regulasi atau kebijakan tentang Pemutakhiran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengukuran Manajemen Risiko Badan Usaha (MR BU), yang mengatur strategi pembinaan dan tata cara evaluasi MR BU	Untuk mengakomodasi pemutakhiran metodologi pengukuran Maturitas MR BU	Deputi Bidang AN	Birokumasi	2026
7	Regulasi atau kebijakan tentang Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan (<i>Continuous Audit Continuous Monitoring/CACM</i>), yang mengatur pelaksanaan CACM dalam mendukung pengawasan prioritas presiden	Untuk mengakomodasi pengembangan dan pemanfaatan sistem CACM	Deputi Bidang PPKD	Birokumasi	2026
8	Regulasi atau kebijakan tentang Optimalisasi Peran Pusdiklatwas BPKP untuk meningkatkan kapabilitas GIA Corpu dalam menyiapkan APIP yang kompeten dan profesional	Untuk mengakomodasi skema optimalisasi peran Pusdiklatwas BPKP untuk meningkatkan kapabilitas GIA Corpu dalam menyiapkan APIP yang kompeten dan profesional	Pusdiklatwas	Birokumasi	2028
9	Regulasi atau kebijakan tentang Penguatan Kompetensi APIP, yang mengatur tata cara pembinaan dan peningkatan kompetensi APIP termasuk pemutakhiran standar kompetensi APIP	Untuk mengatur mengenai strategi peningkatan kompetensi APIP secara Nasional	Pusbin JFA	Deputi Bidang PPKD dan Birokumasi	2029

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH